

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung
Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro No.1
Gedung Meneng, Bandar Lampung, 35145

**PENGARUH P2P *LENDING* DAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2018-2023**

(Skripsi)

Oleh:

Nama : Cathy Stevani Simanjuntak
NPM : 2011021025
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Konsentrasi : Ekonomi Moneter
Pembimbing : Thomas Andrian P.A., S.E., M.Si



**JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

**PENGARUH P2P *LENDING* DAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2018-2023**

Oleh

CATHY STEVANI SIMANJUNTAK

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA EKONOMI**

Pada

**Jurusan Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

PENGARUH P2P *LENDING* DAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2018-2023

Oleh

CATHY STEVANI SIMANJUNTAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *Peer-to-Peer* (P2P) *Lending* dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap pertumbuhan ekonomi di 34 provinsi di Indonesia selama periode 2018–2023. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder berbentuk data panel, yang merupakan kombinasi antara data time series dan cross section. Analisis data dilakukan menggunakan metode *Generalized Method of Moment* (GMM) dalam kerangka panel dinamis melalui perangkat lunak Stata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa P2P *Lending* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan KUR berpengaruh positif dan signifikan. Secara simultan, kedua variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Temuan ini memberikan implikasi penting bagi perumusan kebijakan keuangan inklusif dan pengembangan akses pembiayaan yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Kata kunci: Data Panel, GMM, P2P Lending, Kredit Usaha Rakyat (KUR), Pertumbuhan Ekonomi

ABSTRACT

EFFECTS OF P2P LENDING AND BUSINESS CREDIT (KUR) ON ECONOMIC GROWTH IN INDONESIAN PROVINCES 2018-2023

By

CATHY STEVANI SIMANJUNTAK

This study aims to analyze the influence of Peer-to-Peer (P2P) Lending and People's Business Credit (KUR) on economic growth across 34 provinces in Indonesia during the period 2018–2023. The research adopts a quantitative approach using secondary data in the form of panel data, which combines time series and cross-sectional data. Data analysis was conducted using the Generalized Method of Moment (GMM) within a dynamic panel framework through Stata software. The results indicate that P2P Lending has a negative and significant effect on economic growth, while KUR has a positive and significant effect. Simultaneously, both variables significantly affect economic growth in Indonesia. These findings provide important implications for the formulation of inclusive financial policies and the development of financing access that supports regional economic growth.

Keywords: Panel Data, GMM, P2P Lending, People's Business Credit (KUR), Economic Growth.

Judul Skripsi

: PENGARUH P2P LENDING
DAN KREDIT USAHA
RAKYAT (KUR) TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI
PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2018-2023

Nama Mahasiswa

: Cathy Stevani Simanjuntak

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2011021025

Program Studi

: S1 Ekonomi Pembangunan

Fakultas

: Ekonomi dan Bisnis



Thomas Andrian P.A., S.E., M.Si
NIP. 197805312005011004

MENGETAHUI

Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

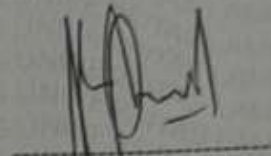
A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Arivina'.

Dr. Arivina Ratih YT, S.E., M.M.
NIP. 19807052006042002

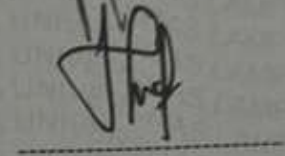
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

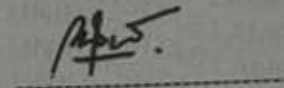
Ketua : Thomas Andrian P.A., S.E., M.Si.



Penguji I : Dr. Tiara Nirmala, S.E. M.Sc.



Penguji II : Nurbetty Herlina Sitorus, S.E., M.Si.



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Nalrobbi, S.E., M.Si
NIP. 196606211990031003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 23 September 2025

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Cathy Stevani Simanjuntak

NPM : 2011021025

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul " Pengaruh P2P Lending Dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi diIndonesia Tahun 2018-2023" merupakan hasil karya saya sendiri, telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan bukan merupakan penjiplakan hasil karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima hukuman atau sanksi yang berlaku.

Bandar Lampung, 23 September 2025

Yang Membuat Pernyataan



Cathy Stevani Simanjuntak
NPM. 2011021025

RIWAYAT HIDUP



Penulis yang bernama Cathy Stevani Simanjuntak merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Penulis menempuh pendidikan Taman Kanak-kanak di TK Pertiwi dan menyelesaikannya di tahun 2007. Kemudian, melanjutkan pendidikan di SD Santa Lusia dan menyelesaikannya di tahun 2013, SMP Negeri 33 Bekasi pada tahun 2017, dan SMA Negeri 9 Kota Bekasi jurusan IPS di tahun 2020.

Kemudian, di tahun 2020 penulis diterima sebagai mahasiswa S1 program studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Semasa kuliah, penulis aktif dalam organisasi UISA (*Unila's International Student Association*)/ AIESEC in Universitas Lampung divisi *External Relation* dimulai tahun 2021–2022. Kemudian, penulis melanjutkan pengalaman organisasinya dalam AIESEC in Indonesia ditahun 2023. Penulis juga berhasil mendapatkan penghargaan *Bronze Medalist* dari University Technology MARA Malaysia dalam kompetisi *Social Science International Category Student in International 5th 2022*.

Untuk meningkatkan pengalaman profesional, penulis juga mengikuti program Magang dan Studi Independent (MSIB) dari Kemedikbud pada Februari 2023 di PT Adi Sarana Armada Tbk (ASSA Rent) Kantor Cabang Lampung sebagai *Account Receivable Intern*. Pada tahun yang sama di bulan September 2023, penulis mengikuti program Magang Generasi Bertalenta (MAGENTA) dari BUMN di PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) Kantor Cabang Utama Lampung sebagai *General Banking Officer Intern*. Lalu, pada November 2023 hingga saat ini, penulis bergabung di PT Wadah Cipta Harapan sebagai tim *Finance dan Administration* dan bertanggungjawab pada beberapa entitas usaha.

MOTTO

Ask, Seek, Knock

“Ask and it will be given to you, seek and you will find, knock and the door will be opened to you”

-Matthew 7 :7

“Whoever has my commands and keeps them is the one who loves me. The one who loves me will be loved by my Father, and I too will love them and show myself to them”

-John 14 : 21

“Dream, Believe, Make it Happen”

-Agnes Monica

PERSEMBAHAN

Puji Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas karunia dan rahmat-Nya yang menyertai penulis hingga saat ini. Dengan penuh sukacita, ku persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orang tuaku tercinta Baba dan Mama,

Rasanya ucapan terima kasih tak akan pernah cukup untuk dapat aku sampaikan kepada kedua orang tuaku. Namun pada kesempatan ini, izinkan aku mengungkapkan rasa terima kasihku kepada Baba dan Mama atas segala doa, bimbingan, nasihat, serta pengorbanan hingga anakmu akhirnya sampai di titik ini.

Untuk adikku tersayang,

Terima kasih atas perhatian dan pengorbanan yang menjadi salah satu sumber penyemangatku selama ini.

Para Dosen dan Civitas Academica

Terima kasih telah memberikan ilmu yang bermanfaat, bimbingan dan dukungan yang sangat berharga untukku.

Keluarga besarku,

Terima kasih atas segala dukungan dan senantiasa mendoakanku hingga hari ini.

Serta,

Almamater tercinta

Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung

SANWANCANA

Puji syukur kehadiran Tuhan Yesus Kristus atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENGARUH P2P LENDING DAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2018-2023”** sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Pada proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan berbagai bimbingan, saran, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan ketulusan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tuaku, Baba Marasal Simanjuntak dan Mama Dormian Hutagaol yang selalu hadir di setiap langkah kehidupanku, yang selalu memberi arahan dan semangat hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Terima kasih telah memberikan dukungan, kepercayaan, serta pilihan ini dalam menjalani hidup. Terima kasih atas lantunan doa yang menyertai di setiap perjalanan ini.
2. Terima kasih juga kepada adikku tersayang Cristian Jose Nathanael Simanjuntak yang selalu membantu dan menjadi sumber tawa serta penyemangatku. Semoga Tuhan memberikan kita kesempatan untuk bisa hidup sehat dan bahagia bersama hingga nanti. Teruntuk adikku, selamat dan semangat menjalani kehidupan mahasiswa baru.
3. Bapak Thomas Andrian P.A., S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, ilmu, arahan, serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

5. Ibu Dr. Arivina Ratih Y.T, S.E., M.M. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Lampung sekaligus Dosen Pembimbing Akademik penulis.
6. Ibu Zulfa Emalia, S.E., M.Sc. selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Lampung.
7. Ibu Nurbetty Herlina Sitorus, S.E., M.Si. selaku Dosen Penguji I yang sudah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan saran dan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Ibu Dr. Tiara Nirmala, S.E., M.Sc. selaku Dosen Penguji II yang sudah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan saran dan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang berharga serta bermanfaat bagi penulis selama masa perkuliahan.
10. Seluruh Staf dan Karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan dan pelayanan selama proses perkuliahan.
11. Tulang tersayang, Roy Chandra Sihotang, S.E., ACPA. selaku Direktur PT Wadah Cipta Harapan sebagai *support-system* dalam penulisan skripsi dan kehidupan penulis selama di Lampung ini.
12. Abang tersayang, Bismar Adhika Pasca Lumbantobing, S.H. selaku Direktur Kantor Hukum Bismar Adhika and Partners sebagai mentor kehidupan semi- militer kepada penulis diatas pukul 19.00 WIB.
13. Abang Izef Puspadani Damanik, S.Pd., M.Pd. selaku Ketua Yayasan Wadah Cipta Harapan sebagai penghibur penulis dari materi mentor kehidupan diatas pukul 19.00 WIB.
14. Inang Tujuana Nainggolan, S.Pd. selaku Komisaris PT Wadah Cipta Harapan dan Amang Torkis Lumbantobing, S.H., M.S. yang selalu memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
15. Keluarga besar dan Mitra kerja WACH Grup yakni PT Wadah Cipta Harapan, Kantor Hukum Bismar Adhika and Partners, Kretya Consultant, CV Wavepro Indonesia, PT Berkah Bagi Nusantara, PT Blessing

Management Indonesia, serta Yayasan Wadah Cipta Harapan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

16. Keluarga Besar ASSA Rent Cabang Lampung terkhusus Abang Afif Mu'tashim S.Ak. dan tim admin dalam memberikan pengetahuan dan pengalaman diluar dunia perkuliahan penulis.
17. Keluarga Besar Bank BTN KCU Bandar Lampung dalam memberikan pengetahuan dan pengalaman diluar dunia perkuliahan penulis.
18. Teman-Teman AIESEC Universitas Lampung terkhusus TethERing dan Powereach. Terimakasih atas kesediaan waktu untuk berproses dengan penulis, semoga Tuhan senantiasa melindungi kita dimanapun berada.
19. Teman-teman Ekonomi Pembangunan Angkatan 2020 yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Serta, seluruh teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk membantuku menjadi *audiens* saat Seminar hingga Ujian Komprehensif.
20. Teman-teman satu atap ketika menjalani KKN Mutar Alam tahun 2023 terkhusus Mosok Si Tsay terima kasih atas kebersamaannya.
21. Seluruh pihak yang telah berkontribusi selama saya menjalani dunia perkuliahan yang tidak dapat disebutkan satu per satu.
22. Terakhir, terima kasih kepada Kiky dan diriku sendiri.

Demikian yang dapat penulis sampaikan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh sekali dari kata sempurna. Namun, penulis berharap skripsi ini dapat memberi manfaat bagi semua pembaca. Semoga Tuhan membalas kebaikan semua pihak yang telah membimbing, membantu, mendoakan, dan mendukung penulis dalam menyelesaikan studi ini.

Bandar Lampung, 23 September 2025
Penulis

Cathy Stevani Simanjuntak

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	18
1.3 Tujuan Penelitian	18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Pertumbuhan Keynesian	19
2.2 Pertumbuhan Ekonomi	21
2.3 <i>Financial Technology</i> (Fintech)	23
2.4 <i>P2P Lending (Peer to Peer Lending)</i>	23
2.5 Kredit Usaha Rakyat (KUR)	26
2.6 Penelitian Terdahulu	26
2.7 Kerangka Pemikiran	28
2.8 Hipotesis Penelitian	30

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian dan Sumber Data	31
3.1.1 Jenis Penelitian	31
3.1.2 Sumber Data	31
3.2 Definisi dan Operasional Variabel	31
3.2.1 Pertumbuhan Ekonomi	31
3.2.2 <i>Peer to Peer (P2P) Lending</i>	32
3.2.3 Kredit Usaha Rakyat (KUR)	32
3.3 Metode Analisis Data	32
3.3.1 Metode Regresi Panel <i>Generalized Method of Moment</i>	34
3.3.2 Metode Estimasi Regresi Data Panel	35
3.3.3 Analisis Statistik Deskriptif	38
3.3.4 Uji Validitas FDGMM dan SYSGMM	39
3.3.5 Uji Konsistensi FDGMM dan SYSGMM	39
3.3.6 Uji Ketidakbiasan FDGMM dan SYSGMM	40
3.3.7 Pengujian Hipotesis Statistik	41
3.3.8 Uji <i>Generalized Method of Moments</i> (GMM)	42

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif	44
4.2 Hasil Penelitian Menggunakan FD-GMM	45
4.2.1 Uji Validitas FD-GMM	46
4.2.2 Uji Konsistensi FD-GMM	47
4.2.3 Uji Ketidakbiasan FD-GMM	48

4.3 Hasil Penelitian Menggunakan SYS-GMM	48
4.3.1 Uji Validitas SYS-GMM	48
4.3.2 Uji Konsistensi SYS-GMM	49
4.3.3 Uji Ketidakbiasan SYS-GMM	50
4.3.4 Hasil Estimasi SYS-GMM	51
4.3.5 Hasil Estimasi Pengaruh Simultan	52
4.4 Individual Effect	52
4.5 Pembahasan Hasil Penelitian	53
4.5.1 Pengaruh P2P <i>Lending</i> terhadap Pertumbuhan Ekonomi	53
4.5.2 Pengaruh KUR terhadap Pertumbuhan Ekonomi	55
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	57
5.2 Saran	57
 DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN	62

DAFTAR TABEL

Tabel

1.1 Pertumbuhan Ekonomi diseluruh Provinsi di Indonesia (Persen)	2
1.2 Data P2P Lending diseluruh Provinsi di Indonesia (Triliun Rupiah) ..	7
1.3 Data Penyaluran KUR di Provinsi Indonesia (Triliun Rupiah)	14
2.1 Ringkasan Hasil Penelitian	26
3.1 Deskripsi Data.....	32
4.1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	44
4.2 Hasil FD-GMM.....	45
4.3 Hasil Uji Sargan FD-GMM	46
4.4 Hasil Uji Konsistensi FD-GMM.....	47
4.5 Hasil Uji Ketidakbiasan FD-GMM.....	48
4.6 Hasil Uji Validitas SYS-GMM.....	49
4.7 Hasil Uji Konsistensi SYS-GMM.....	49
4.8 Hasil Uji Ketidakbiasan FD-GMM.....	50
4.9 Hasil Uji Estimasi SYS-GMM	51
4.10 Hasil Uji Simultan (Wald).....	52
4.11 Hasil <i>Individual Effect</i>	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar	
2.1 <i>Keynesian Cross Diagram</i>	21
2.2 Kerangka Pemikiran.....	29

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator utama dan penting terkait kesejahteraan suatu negara, termasuk Indonesia. Ekonomi yang tumbuh dengan baik menunjukkan adanya peningkatan aktivitas ekonomi, kesempatan kerja, dan pendapatan masyarakat, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kualitas hidup (Safariyani dan Taufiqurahman, 2023). Indonesia sebagai negara dengan wilayah dan populasi yang luas, upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai provinsi menjadi sangat penting. Namun, ketimpangan atau *gap* ekonomi antar provinsi masih menjadi tantangan besar, terutama di wilayah-wilayah yang belum memiliki akses penuh ke sumber-sumber pembiayaan yang mendukung sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Pertumbuhan ekonomi regional atau wilayah di Indonesia memang menjadi target utama yang terkait erat dengan upaya pemerataan pembangunan oleh pemerintah. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki tantangan unik dalam menciptakan kesetaraan ekonomi di berbagai daerah, terutama antara wilayah barat dan timur, serta antara pusat kota dengan daerah pedesaan dan terpencil. Pemerintah terus berupaya untuk mengurangi ketimpangan ekonomi antarwilayah ini melalui berbagai program pembangunan dan kebijakan pemerataan. Strategi pemerataan ini sering kali difokuskan pada beberapa aspek utama antara lain: Pembangunan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, bandara, dan akses komunikasi merupakan prioritas untuk menghubungkan daerah-daerah yang sebelumnya sulit dijangkau. Perbaikan kondisi perekonomian dan sosial seperti infrastruktur yang memadai, akses terhadap pasar, layanan publik, dan peluang ekonomi dapat lebih mudah dijangkau oleh masyarakat di wilayah terpencil, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Selain itu, UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian lokal.

Pemerintah berupaya memperluas akses pembiayaan dan pelatihan bagi UMKM, khususnya melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan kemitraan dengan lembaga keuangan (Aggarwal, 2022).

Pertumbuhan ekonomi regional memang menjadi indikator penting yang dapat menarik minat investasi ke daerah. Pertumbuhan ekonomi yang baik pada suatu daerah mencerminkan peningkatan kinerja pasar, daya beli masyarakat, dan potensi keuntungan bagi investor (Parishev et al., 2020). Ketika suatu wilayah menunjukkan pertumbuhan yang positif dan stabil, hal ini menandakan adanya lingkungan yang kondusif bagi bisnis dan pengembangan usaha, yang pada gilirannya bisa menarik minat investasi lebih besar. Tabel di bawah ini merupakan data pertumbuhan ekonomi diseluruh provinsi di Indonesia tahun 2018-2023.

Tabel 1.1 Pertumbuhan Ekonomi diseluruh Provinsi di Indonesia (Persen)

No.	Provinsi	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-rata
1	Aceh	5,18	5,21	-0,4	2,35	4,87	5,12	3,73
2	Sumatera Utara	5,32	5,22	-1,1	2,61	5,12	5,34	3,76
3	Sumatera Barat	5,15	5,06	-1	2,85	5,31	5,41	3,80
4	Riau	2,34	2,83	-0,3	3,36	4,75	5,01	3,00
5	Kepulauan Riau	4,53	4,89	-3,8	2,43	4,78	5,32	3,02
6	Jambi	4,69	4,71	-0,8	3,01	5,22	5,42	3,71
7	Sumatera Selatan	5,51	5,34	-0,1	3,28	5,37	5,45	4,14
8	Bangka Belitung	4,41	4,66	-2	3,12	4,67	5,23	3,36
9	Bengkulu	4,98	4,92	-0,7	2,85	5,02	5,33	3,73
10	Lampung	5,29	5,25	-1,7	2,62	4,93	5,25	3,61
11	DKI Jakarta	6,17	5,89	-2,4	3,56	5,37	5,72	4,06
12	Jawa Barat	5,67	5,65	-2,4	3,73	5,67	6,01	4,05
13	Banten	5,54	5,47	-2	3,42	5,41	5,84	3,95
14	Jawa Tengah	5,54	5,51	-2,3	3,68	5,54	5,96	3,99
15	DI Yogyakarta	6,08	6,14	-2,7	4,01	5,92	6,32	4,30
16	Jawa Timur	5,47	5,51	-2,4	3,69	5,52	5,97	3,96
17	Bali	5,99	6,11	-9,3	2,35	4,84	6,18	2,69
18	Nusa Tenggara Barat	4,57	5,03	-0,6	3,09	5,11	5,42	3,76
19	Nusa Tenggara Timur	5,18	5,24	-0,5	3,12	5,42	5,61	4,02
20	Kalimantan Barat	5,07	5,12	-0,7	3,02	5,01	5,45	3,83
21	Kalimantan	6,3	6,13	0,21	3,72	5,84	6,09	4,72

No.	Provinsi	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-rata
	Tengah							
22	Kalimantan Selatan	5,13	5,24	-1,2	2,98	5,02	5,34	3,75
23	Kalimantan Timur	3,91	4,27	-1,1	3,56	5,17	5,73	3,58
24	Kalimantan Utara	4,35	4,53	-1	3,24	5,04	5,29	3,57
25	Sulawesi Utara	6,45	6,37	0,23	3,97	6,11	6,38	4,92
26	Gorontalo	5,79	5,81	-0,2	3,21	5,48	5,81	4,32
27	Sulawesi Tengah	6,15	6,23	1,05	4,25	6,27	6,42	5,06
28	Sulawesi Selatan	7,01	7,14	0,04	4,38	6,42	6,68	5,28
29	Sulawesi Barat	5,35	5,47	-0,4	3,11	5,11	5,38	4,00
30	Sulawesi Tenggara	5,82	5,89	-0	3,64	5,89	6,17	4,56
31	Maluku	5,95	5,97	-0,2	3,42	5,72	6,03	4,48
32	Maluku Utara	6,25	6,48	0,32	3,83	6,19	6,54	4,94
33	Papua	7,34	7,42	-0,7	3,57	6,07	6,41	5,03
34	Papua Barat	6,24	6,42	-1,1	3,01	5,54	5,87	4,33
35	Papua Tengah	-	-	-	-	-	5,82	5,82
36	Papua Pegunungan	-	-	-	-	-	5,74	5,74
37	Papua Selatan	-	-	-	-	-	5,79	5,79
38	Papua Barat Daya	-	-	-	-	-	5,76	5,76

Sumber: Badan Pusat Statistik (Data diolah, 2025)

Data pertumbuhan ekonomi pada tabel di atas mencerminkan variasi pertumbuhan ekonomi di setiap provinsi di Indonesia dari tahun 2018 hingga 2023. Secara umum, pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan signifikan pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19 yang mengakibatkan penurunan aktivitas ekonomi secara global. Provinsi-provinsi seperti Bali, yang sangat bergantung pada sektor pariwisata, menunjukkan penurunan yang signifikan pada tahun 2020 dengan pertumbuhan negatif sebesar -9,3%. Sebaliknya, beberapa provinsi seperti Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan tetap menunjukkan angka positif meskipun melambat, karena aktivitas ekonomi di sektor tambang dan komoditas tetap berjalan.

Pada tahun 2021 hingga 2023, sebagian besar provinsi mulai menunjukkan pemulihan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi kembali positif dengan peningkatan signifikan terutama pada provinsi-provinsi yang mengandalkan sektor industri dan jasa. Sebagai contoh, provinsi seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur mulai meningkat secara perlahan karena pulihnya sektor manufaktur dan perdagangan. Namun, provinsi seperti Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya baru mulai memiliki data pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023, yang menunjukkan bahwa daerah ini masih dalam tahap awal pengembangan dan belum memiliki pola pertumbuhan historis yang konsisten. Maka dari itu, hal inilah yang menyebabkan penelitian ini hanya menggunakan 34 provinsi sebagai objek penelitian karena empat provinsi di Papua mengalami pemekaran pada tahun 2022.

Fenomena utama yang terlihat pada Tabel 1.1 bahwa pemulihan ekonomi pasca-pandemi tidak merata di seluruh Indonesia. Provinsi dengan basis ekonomi yang beragam, seperti Jawa dan Sumatra, cenderung pulih lebih cepat dibandingkan dengan provinsi yang lebih bergantung pada satu sektor, seperti pariwisata atau komoditas tertentu. Hal ini menunjukkan perlunya diversifikasi ekonomi dan pembangunan infrastruktur di daerah-daerah tertentu untuk meningkatkan ketahanan terhadap guncangan ekonomi global. Selain itu, pertumbuhan yang signifikan di provinsi seperti Sulawesi dan Kalimantan menunjukkan potensi pengembangan kawasan luar Jawa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia.

Secara keseluruhan, ekonomi Indonesia mulai pulih dengan pertumbuhan 3,69% pada 2021, didorong oleh peningkatan konsumsi dan ekspor. Pembukaan bertahap aktivitas ekonomi dan percepatan vaksinasi COVID-19 memberikan dorongan positif bagi ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia melanjutkan tren positif, mencapai sekitar 5,31%. Faktor utama pemulihan adalah konsumsi domestik yang meningkat dan ekspor yang lebih kuat karena harga komoditas global yang tinggi, terutama batu bara dan kelapa sawit. Hal ini memberikan keuntungan bagi Indonesia sebagai salah satu pengekspor utama kedua komoditas tersebut.

Krisis energi dan pangan akibat perang Rusia-Ukraina pada 2022 menyebabkan inflasi global meningkat. Meski demikian, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan subsidi energi dan pangan untuk menjaga daya beli masyarakat agar inflasi tetap terkendali. Tahun 2023 ekonomi Indonesia tetap tumbuh di kisaran 5%, didorong oleh konsumsi rumah tangga, investasi, dan sektor-sektor seperti jasa, perdagangan, dan manufaktur. Pertumbuhan ekonomi digital semakin meningkat, terutama di sektor *fintech*, *e-commerce*, dan logistik. Ini berperan penting dalam mendukung aktivitas ekonomi di tengah ketidakpastian ekonomi global (Ambarita et al., 2024).

Pasca pandemi COVID-19, pemerintah Indonesia mengupayakan untuk mendorong pemulihan ekonomi dengan memaksimalkan dukungan pada UMKM. Pemerintah memanfaatkan dua skema pembiayaan, yaitu P2P (*peer to peer*) *lending* dan Kredit Usaha Rakyat (KUR), untuk mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi dengan fokus pada peningkatan modal kerja bagi UMKM (Amrillah dan Falianty, 2024). Pinjaman berbasis teknologi ini memungkinkan UMKM mengakses modal dengan lebih cepat dan mudah, terutama bagi masyarakat yang memiliki kendala akses ke perbankan tradisional. P2P *lending* juga menawarkan beragam opsi pembiayaan yang sesuai dengan berbagai jenis usaha dan skala bisnis, membantu UMKM meningkatkan produktivitas tanpa birokrasi yang panjang. P2P *lending* menjadi solusi alternatif yang cepat dan mudah diakses oleh UMKM, terutama masyarakat yang tidak memiliki agunan atau riwayat kredit yang dibutuhkan oleh bank. Platform P2P *lending* memanfaatkan teknologi untuk menjembatani antara pemberi pinjaman (investor) dan UMKM yang membutuhkan modal, memperluas sumber pembiayaan bagi UMKM secara nasional. Dukungan regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pemerintah turut memastikan bahwa sektor P2P *lending* tetap aman dan bisa diakses oleh pelaku UMKM yang memerlukan pembiayaan tambahan untuk ekspansi usaha atau meningkatkan modal kerja.

P2P *Lending* di Indonesia diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Kebijakan ini mengatur terkait tata kelola penyelenggaraan

P2P *Lending*, penetapan syarat pendaftaran dan perizinan perusahaan P2P *Lending*, pembatasan pemberian pinjaman per individu hingga maksimum Rp2 miliar, dan penjaminan transparansi, seperti tingkat bunga, biaya layanan, dan risiko. Selain itu, POJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital, kebijakan ini mengatur panduan umum tentang inovasi keuangan berbasis teknologi, dan sandbox untuk uji coba inovasi sebelum diterapkan secara luas. Output yang diharapkan dengan adanya regulasi tersebut adalah peningkatan akses pendanaan dengan memperluas akses pinjaman bagi individu dan UMKM yang belum terlayani oleh layanan perbankan tradisional (*unbanked* dan *underbanked*). Kepastian hukum merupakan salah satu output selanjutnya untuk memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara, pemberi pinjaman, dan peminjam dalam transaksi berbasis teknologi informasi (Wajuba et al., 2021).

Indonesia memiliki beberapa bentuk P2P *lending* yang beragam, dirancang untuk memenuhi berbagai kebutuhan finansial, baik untuk bisnis maupun individu. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur dan mengawasi P2P *lending* agar tetap aman dan terstruktur. P2P *lending* produktif merupakan pinjaman yang diberikan kepada peminjam untuk tujuan produktif, seperti modal usaha, pembelian inventaris, atau pengembangan bisnis. UMKM adalah target utama dari P2P *lending* produktif karena sering mengalami kesulitan dalam memperoleh pinjaman konvensional dari perbankan. Platform seperti Modalku dan Investree merupakan contoh P2P *lending* produktif yang berfokus pada pembiayaan usaha kecil dan menengah. Bentuk lainnya adalah P2P *lending* konsumtif, bentuk P2P ini menyediakan pinjaman untuk kebutuhan konsumtif, seperti pembelian barang elektronik, perjalanan, atau renovasi rumah. Peminjam dapat mengajukan pinjaman secara online melalui platform yang menawarkan P2P *lending* konsumtif, yang biasanya memiliki durasi pinjaman yang lebih pendek dan tingkat bunga yang berbeda dari pinjaman produktif. Contoh platform yang menyediakan P2P *lending* konsumtif adalah Julo dan Kredit Pintar (Maulana dan Wiharno, 2023).

P2P *lending* berperan penting dalam perekonomian masyarakat di daerah di Indonesia karena menyediakan akses pembiayaan yang fleksibel dan cepat bagi berbagai sektor ekonomi yang seringkali sulit mendapatkan akses kredit dari lembaga keuangan tradisional.

Banyak UMKM di daerah yang menghadapi kendala akses ke perbankan formal karena keterbatasan jaminan atau lokasi yang jauh dari pusat keuangan. P2P *lending* memberikan alternatif yang cepat dan mudah diakses oleh UMKM untuk memperoleh modal kerja yang penting bagi keberlanjutan dan pengembangan bisnis. P2P *lending* membantu mempercepat inklusi keuangan di daerah yang belum terlayani oleh lembaga keuangan konvensional. Teknologi digital seperti P2P *lending* dapat diakses secara *online*, sehingga lebih banyak masyarakat di daerah dapat mengakses layanan keuangan dengan mudah (Maulana dan Wiharno, 2022). Berikut ini merupakan data akumulasi P2P *lending* yang telah tersalurkan ke masyarakat tahun 2018-2023 diseluruh provinsi di Indonesia

Tabel 1.2 Data P2P Lending diseluruh Provinsi di Indonesia (Triliun Rupiah)

No.	Provinsi	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-rata
1	Aceh	1.2	2.5	3.1	3.8	4.5	5	3.35
2	Sumatera Utara	3	4.5	5.8	7	8.2	9	6.25
3	Sumatera Barat	1.5	2.8	3.5	4.2	5	5.8	3.80
4	Riau	2	3.8	4.5	5.6	6.7	7.5	5.02
5	Kepulauan Riau	1	2.2	3	3.8	4.5	5	3.25
6	Jambi	1.1	2.3	3	3.7	4.4	4.8	3.22
7	Sumatera Selatan	2.5	4	5	6.2	7.4	8.2	5.55
8	Bangka Belitung	0.8	1.8	2.5	3.2	3.8	4.2	2.72
9	Bengkulu	0.6	1.5	2	2.5	3	3.5	2.18
10	Lampung	1.8	3.2	4	5	6	6.8	4.47
11	DKI Jakarta	10	15	18	20.5	23	25	18.58
12	Jawa Barat	8	12.5	15	17.8	20	22.5	15.97
13	Banten	4	7	9	11	12.8	14	9.63
14	Jawa Tengah	6	9.5	12	14.2	16.5	18	12.70
15	DI Yogyakarta	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.2	3.95
16	Jawa Timur	7	10.5	13	15.5	17.8	19.5	13.88
17	Bali	2	3.5	4.5	5.5	6.5	7.2	4.87
18	Nusa Tenggara Barat	1	2	2.8	3.5	4	4.5	2.97

No.	Provinsi	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-rata
19	Nusa Tenggara Timur	0.8	1.8	2.5	3.2	3.8	4.2	2.72
20	Kalimantan Barat	1.5	3	4	5	6	6.8	4.38
21	Kalimantan Tengah	1.2	2.5	3.5	4.2	5	5.5	3.65
22	Kalimantan Selatan	2	3.5	4.5	5.5	6.5	7.2	4.87
23	Kalimantan Timur	2.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5	5.83
24	Kalimantan Utara	0.5	1.2	1.8	2.5	3	3.5	2.08
25	Sulawesi Utara	1.5	2.8	3.5	4.2	5	5.5	3.75
26	Gorontalo	0.6	1.5	2	2.5	3	3.5	2.18
27	Sulawesi Tengah	1.8	3	4	5	6	6.8	4.43
28	Sulawesi Selatan	3	5	6.5	7.8	9	10	6.88
29	Sulawesi Barat	0.8	1.8	2.5	3	3.8	4.2	2.68
30	Sulawesi Tenggara	1.2	2.5	3.5	4.2	5	5.5	3.65
31	Maluku	0.8	1.8	2.5	3	3.5	4	2.60
32	Maluku Utara	0.6	1.5	2	2.5	3	3.5	2.18
33	Papua	1.2	2.5	3	3.8	4.5	5	3.33
34	Papua Barat	0.8	1.8	2.5	3	3.5	4	2.60

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (Data diolah, 2025)

Fenomena yang terlihat pada data P2P *lending* di Tabel 1.2 menunjukkan pertumbuhan signifikan dari tahun 2018 hingga 2023 di sebagian besar provinsi. Pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya inklusi keuangan dan adopsi teknologi finansial (*fintech*) di Indonesia (Amrillah & Falianty, 2024b). Daerah-daerah dengan infrastruktur digital yang lebih baik, seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur, memiliki rata-rata P2P *lending* yang jauh lebih tinggi dibandingkan daerah lain. Hal ini menandakan bahwa akses terhadap internet, literasi digital, dan ketersediaan sumber daya memainkan peran penting dalam menentukan penetrasi layanan P2P *lending*.

Namun, data juga menunjukkan disparitas yang signifikan antar provinsi. Provinsi di wilayah timur Indonesia, seperti Papua Barat, Maluku, dan Kalimantan Utara, mencatat angka P2P *lending* yang relatif rendah dibandingkan provinsi di Jawa dan Sumatera.

Hal ini mencerminkan tantangan terkait infrastruktur fisik dan digital, literasi keuangan yang rendah, serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap *platform* digital. Selain itu, ketimpangan ini dapat memperburuk ketidakmerataan akses terhadap modal usaha, yang pada gilirannya dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi regional.

Menurut data dari OJK (2024), mayoritas penggunaan layanan fintech P2P *lending* di Indonesia dialokasikan untuk kebutuhan konsumtif daripada produktif. Maret 2023, sekitar 60,03% dari total pinjaman yang disalurkan oleh industri, atau setara dengan Rp11,85 triliun, dialokasikan untuk konsumsi. Angka ini menunjukkan peningkatan dari 59,33% pada Februari 2023 dan 57,96% pada Desember 2022. Hingga Agustus 2024, proporsi pinjaman konsumtif terus meningkat secara signifikan, mencapai 70,8% dari total piutang fintech *lending* yang bernilai Rp27,4 triliun. Berdasarkan data tersebut, jika dikaitkan dengan kerangka *Keynesian Cross Diagram*, P2P *lending* yang mempengaruhi sisi konsumsi dapat dijelaskan melalui peningkatan pengeluaran agregat (*aggregate expenditure*). P2P *lending* memberikan akses pembiayaan yang lebih mudah kepada masyarakat, terutama untuk kebutuhan konsumtif. Pinjaman ini meningkatkan daya beli individu, yang kemudian mendorong pengeluaran rumah tangga (*consumption expenditure*). Berdasarkan diagram *Keynesian Cross*, pengeluaran rumah tangga merupakan komponen utama dari garis pengeluaran agregat (AE), yang mencakup konsumsi (C), investasi (I), belanja pemerintah (G), dan *net ekspor* ($X-M$). Ketika konsumsi meningkat akibat adanya penyaluran P2P *lending*, garis AE bergeser ke atas, mencerminkan kenaikan pengeluaran pada setiap tingkat pendapatan nasional (Y). Efek dari peningkatan konsumsi ini dapat menciptakan *multiplier effect*, di mana peningkatan pengeluaran awal menghasilkan kenaikan pendapatan nasional yang lebih besar melalui siklus konsumsi dan produksi.

Permasalahan lain yang muncul adalah potensi risiko kredit macet yang lebih tinggi di wilayah dengan pertumbuhan P2P *lending* yang cepat tetapi tidak diimbangi oleh mekanisme penilaian risiko yang memadai. Jika pemberi pinjaman dan *platform* fintech kurang selektif dalam memverifikasi kelayakan peminjam,

maka dapat terjadi lonjakan kredit macet, terutama di daerah yang baru mengenal *fintech*. Selain itu, regulasi yang kurang matang dan pengawasan yang lemah juga menjadi tantangan dalam menjaga keberlanjutan ekosistem P2P *lending* di Indonesia. Hal ini memerlukan perhatian pemerintah untuk meningkatkan regulasi, edukasi, dan akses infrastruktur agar manfaat P2P *lending* dapat dirasakan secara merata.

Peningkatan akumulasi penyaluran pinjaman melalui P2P *lending* secara nasional dari tahun 2018 hingga 2023 merupakan hasil dari berbagai faktor yang saling mendukung, termasuk perkembangan teknologi finansial, kebutuhan modal bagi UMKM, dan peningkatan inklusi keuangan. Sektor UMKM seringkali kesulitan mendapatkan akses pembiayaan dari perbankan konvensional karena keterbatasan jaminan dan kurangnya riwayat kredit yang memadai. P2P *lending* menawarkan solusi dengan proses yang lebih cepat, bunga yang kompetitif, dan persyaratan yang fleksibel. Permintaan pembiayaan oleh UMKM, terutama untuk meningkatkan modal kerja dan ekspansi usaha, menjadi pendorong utama peningkatan akumulasi penyaluran pinjaman. UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional, semakin mengandalkan P2P *lending* untuk memenuhi kebutuhan modalnya (Amrillah dan Falianty, 2024). Selama masa pandemi COVID-19, terjadi peningkatan signifikan dalam akumulasi penyaluran P2P *lending* di Indonesia. Pandemi menciptakan kondisi ekonomi yang menantang, yang membuat P2P *lending* menjadi salah satu alternatif utama pembiayaan bagi usaha kecil dan menengah (UMKM) serta individu yang kesulitan mengakses kredit perbankan (Nopiah et al., 2024).

Meskipun P2P *lending* menawarkan solusi pembiayaan yang fleksibel dan mudah diakses, ada beberapa permasalahan utama terkait penggunaannya di Indonesia yang perlu diatasi untuk memastikan ekosistem yang sehat dan berkelanjutan. Banyak peminjam, khususnya di sektor UMKM dan individu, mengalami kesulitan dalam membayar kembali pinjaman. Kredit macet atau *Non Performing Loan* (NPL) yang tinggi ini menjadi tantangan besar bagi banyak *platform* P2P *lending*. Tingginya tingkat kredit macet dapat mengurangi kepercayaan investor

dan pemberi pinjaman, menghambat pertumbuhan industri, serta menimbulkan kerugian finansial bagi platform dan pemberi pinjaman.

Beberapa peminjam mencoba mengambil keuntungan dengan mengajukan pinjaman di banyak *platform* sekaligus tanpa niat untuk melunasinya, yang dikenal sebagai praktik pinjaman berganda atau *multiple borrowing*. Munculnya *platform* P2P *lending* ilegal yang tidak terdaftar di OJK juga menjadi masalah. *Platform-platform* ini sering kali menawarkan suku bunga yang tinggi dan praktik penagihan yang tidak etis, yang merugikan peminjam dan merusak citra industri (Rizky dan Fitriyah, 2024).

P2P *lending* memiliki keterkaitan yang kuat dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, terutama dalam mendorong inklusi keuangan dan mendukung keberlanjutan UMKM. Banyak UMKM di Indonesia menghadapi keterbatasan akses ke perbankan formal karena keterbatasan agunan dan persyaratan administratif yang rumit. P2P *lending* memberikan akses modal yang lebih mudah dan cepat, memungkinkan UMKM untuk berkembang, memperluas usaha, dan menciptakan lapangan kerja baru. Peningkatan produktivitas dan daya saing UMKM berkontribusi terhadap PDB yang juga meningkat dan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. P2P *lending* menawarkan berbagai jenis pinjaman, seperti pinjaman untuk pendidikan, kesehatan, atau konsumsi produktif lainnya, yang tidak selalu ditawarkan oleh lembaga perbankan. Inovasi ini memungkinkan masyarakat untuk memperoleh pembiayaan sesuai kebutuhan, yang dapat meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas. Melalui berbagai produk-produk pembiayaan yang inovatif, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan spesifik yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi (Maulana dan Wiharno, 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni dan Haryatiningsih (2024) menemukan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara penyaluran P2P *lending* dan pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat. Jawa Barat memiliki jumlah UMKM yang besar dan berperan signifikan dalam perekonomian daerah. Namun, banyak UMKM menghadapi kesulitan dalam mengakses modal dari perbankan

konvensional. P2P *lending* memberikan alternatif yang cepat dan mudah bagi UMKM untuk mendapatkan pembiayaan.

Modal tambahan ini dapat memperluas usaha, meningkatkan produksi, dan menciptakan lapangan kerja, yang semuanya berkontribusi pada peningkatan ekonomi daerah.

Hasil yang berbeda didapatkan oleh Basnayake et al., (2024) yang menemukan bahwa P2P *lending* tidak berpengaruh terhadap perekonomian nasional di beberapa wilayah Asia Pasifik. P2P *lending* di beberapa wilayah Asia Pasifik belum memberikan pengaruh signifikan terhadap perekonomian nasional karena sejumlah faktor yang menghambat adopsi, regulasi, dan dampaknya pada ekonomi.

Beberapa negara di Asia Pasifik, terutama di kawasan Asia Selatan dan Kepulauan Pasifik, masih mengalami keterbatasan akses terhadap internet dan teknologi digital yang memadai. Konektivitas yang rendah ini membatasi penyebaran P2P *lending* berbasis digital, menghambat potensinya dalam memberikan akses keuangan yang merata. Beberapa wilayah Asia Pasifik juga, isu tentang literasi keuangan dan pemahaman tentang teknologi finansial masih rendah. Banyak orang yang tidak sepenuhnya memahami cara kerja P2P *lending*, termasuk risiko dan kewajiban yang terlibat.

Selain P2P *lending* yang mencerminkan pembiayaan melalui sistem digital, pembiayaan secara konvensional juga dapat berupa penyaluran KUR melalui beberapa lembaga resmi yang sudah ditunjuk pemerintah. KUR adalah salah satu bentuk pembiayaan konvensional yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia untuk membantu UMKM dalam mengakses modal dengan bunga rendah (Khoiriah et al., 2024). KUR sangat penting dalam mendukung ekonomi masyarakat, khususnya usaha kecil dan mikro yang sering kali sulit mendapatkan pembiayaan dari bank komersial atau lembaga keuangan besar. Pemerintah menetapkan bunga KUR jauh di bawah bunga komersial biasa, sehingga pelaku UMKM dapat mengakses modal tanpa beban bunga yang besar. Ini memungkinkan mereka untuk memulai atau mengembangkan usahanya. KUR difokuskan pada sektor-sektor produktif seperti pertanian, perikanan, industri kreatif, dan perdagangan,

yang memiliki dampak besar terhadap perekonomian nasional. Pasca pandemi, banyak UMKM membutuhkan modal untuk bangkit kembali.

KUR menjadi salah satu program yang memberikan dukungan ini, membantu UMKM pulih dan berkontribusi pada ekonomi nasional.

KUR merupakan program kredit bersubsidi dari pemerintah Indonesia untuk mendukung pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan koperasi. KUR mempunyai landasan hukum dan regulasi yang mengaturnya. Regulasi tersebut antara lain; Perpres No. 79 Tahun 2019 tentang KUR: Mengarahkan target sasaran KUR, seperti sektor produktif, dengan bunga yang lebih rendah.

Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia: Mengatur penggunaan data untuk mendukung implementasi KUR, Permenko No. 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR: Mengatur mekanisme pelaksanaan KUR, termasuk tata cara pengajuan, plafon, dan subsidi bunga, dan Permenko Bidang Perekonomian sebelumnya diperbaharui setiap tahun untuk menyesuaikan target KUR. Peraturan tersebut diharapkan dapat meningkatkan akses pembiayaan dan mendorong pelaku usaha mikro dan kecil untuk memperoleh akses pembiayaan yang lebih murah dan terjangkau. Selain itu, KUR diharapkan dapat meningkatkan produktivitas usaha kecil. Peningkatan produktivitas melalui program KUR berfokus pada pemberian akses pembiayaan yang mudah dan terjangkau bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta koperasi (Fitriyani dan Fatmayanti, 2023).

KUR di Indonesia telah menjadi salah satu program penting dalam mendukung perkembangan ekonomi, khususnya untuk sektor UMKM. Program KUR ini memiliki peran signifikan dalam memperkuat sektor ekonomi mikro dan meningkatkan inklusi keuangan (Istan, 2023). Pemerintah secara konsisten meningkatkan alokasi dana KUR setiap tahun, mencerminkan komitmen yang kuat terhadap dukungan UMKM. Tahun 2023 target penyaluran KUR ditingkatkan hingga lebih dari Rp 300 triliun. Tingginya penyerapan KUR menunjukkan minat dan kebutuhan besar dari pelaku UMKM di berbagai sektor, dari perdagangan hingga pertanian. Tahun 2022 sebagian besar dana KUR tersalurkan dengan baik, menandakan bahwa program ini mendapat respons

positif dari Masyarakat (Fitriyani dan Fatmayanti, 2023). Pemerintah terus menurunkan suku bunga KUR, yang awalnya berada di atas 10%, menjadi sekitar 6% pada tahun 2020. Penurunan bunga ini bertujuan agar UMKM lebih mudah mengakses dana dan mengurangi beban finansial. Melalui jaringan bank dan lembaga keuangan yang bekerja sama, KUR berhasil menjangkau UMKM di daerah pedesaan dan terpencil. Hal ini membantu meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia, sehingga masyarakat yang sebelumnya sulit mengakses modal kini bisa mendapatkan pinjaman. Berikut ini merupakan data penyaluran KUR diseluruh provinsi di Indonesia dari tahun 2018-2023.

Tabel 1.3 Data Penyaluran KUR di Provinsi Indonesia 2018-2023 (Triliun Rupiah)

No.	Provinsi	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-rata
1	Aceh	5.2	5.6	4.8	5.5	6.1	6.7	5.65
2	Sumatera Utara	12.5	13.1	11.3	13.5	15.2	16.8	13.73
3	Sumatera Barat	7.3	7.8	6.7	8	9	10.2	8.17
4	Riau	8.1	8.5	7.5	8.8	9.6	10.8	8.88
5	Kepulauan Riau	3.9	4.3	3.7	4.5	5	5.5	4.48
6	Jambi	4.2	4.6	4	4.8	5.3	6	4.82
7	Sumatera Selatan	10.3	11	9.5	11.2	12.5	14	11.42
8	Bangka Belitung	3.1	3.4	2.9	3.5	3.9	4.3	3.52
9	Bengkulu	2.9	3.2	2.7	3.3	3.7	4	3.30
10	Lampung	9.5	10	8.6	10.2	11.3	12.7	10.38
11	DKI Jakarta	8.9	9.5	8	9.8	10.5	11.6	9.72
12	Jawa Barat	22.5	24	20.5	25	28.3	31.5	25.30
13	Banten	10.2	11	9.5	11.8	13	14.6	11.68
14	Jawa Tengah	20.5	22	18.7	23.2	26	29	23.23
15	DI Yogyakarta	4.3	4.6	3.9	4.8	5.3	5.8	4.78
16	Jawa Timur	25.5	27	23	28	31.5	35	28.33
17	Bali	7.5	8	6.5	7.8	8.7	9.6	8.02
18	Nusa Tenggara Barat	6.1	6.5	5.6	6.8	7.5	8.3	6.80
19	Nusa Tenggara Timur	5.8	6.2	5.3	6.4	7.2	8	6.48
20	Kalimantan Barat	6.3	6.8	5.9	6.9	7.6	8.4	6.98
21	Kalimantan Tengah	4.8	5.2	4.5	5.4	6	6.7	5.43
22	Kalimantan Selatan	7.4	7.9	6.7	7.8	8.7	9.5	8.00
23	Kalimantan Timur	6.2	6.7	5.8	6.8	7.5	8.3	6.88
24	Kalimantan Utara	1.8	2	1.7	2.1	2.3	2.6	2.08
25	Sulawesi Utara	5.4	5.8	5	5.9	6.5	7.2	5.97

No.	Provinsi	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-rata
26	Gorontalo	2.3	2.5	2.1	2.6	2.9	3.3	2.62
27	Sulawesi Tengah	5.9	6.4	5.3	6.5	7.2	8	6.55
28	Sulawesi Selatan	11.8	12.5	10.7	12.8	14.3	15.7	12.97
29	Sulawesi Barat	3.2	3.5	3	3.5	3.9	4.4	3.58
30	Sulawesi Tenggara	5.1	5.5	4.7	5.6	6.3	7	5.70
31	Maluku	3.1	3.4	2.9	3.5	3.9	4.3	3.52
32	Maluku Utara	2.5	2.8	2.3	2.8	3.2	3.6	2.87
33	Papua	4	4.4	3.8	4.5	5	5.5	4.53
34	Papua Barat	2.7	3	2.5	3.1	3.5	4	3.13

Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI (2025)

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) menunjukkan tren peningkatan dari 2018 hingga 2023 di hampir seluruh provinsi Indonesia. Misalnya, Jawa Timur mencatat rata-rata penyaluran tertinggi sebesar 28,33 triliun, diikuti oleh Jawa Barat sebesar 25,30 triliun, dan Jawa Tengah sebesar 23,23 triliun. Wilayah dengan penyaluran tertinggi ini mencerminkan potensi ekonomi yang besar, khususnya di sektor pertanian, perdagangan, dan industri kecil. Sebaliknya, provinsi seperti Kalimantan Utara (rata-rata 2,08 triliun) dan Gorontalo (2,62 triliun) memiliki angka penyaluran yang lebih rendah, mencerminkan tantangan geografis, aksesibilitas, dan skala ekonomi yang lebih kecil.

Secara keseluruhan, tren penyaluran KUR dipengaruhi oleh upaya pemerintah untuk mendukung UMKM sebagai pilar ekonomi, khususnya setelah dampak pandemi COVID-19. Namun, ketimpangan penyaluran terlihat antara provinsi yang memiliki infrastruktur ekonomi maju dengan wilayah yang lebih terpencil. Terkait daerah seperti Papua dan Papua Barat, penyaluran KUR relatif rendah karena keterbatasan akses perbankan, rendahnya literasi keuangan, dan risiko kredit yang lebih tinggi. Selain itu, wilayah-wilayah dengan ketergantungan pada sektor primer, seperti pertanian, sering menghadapi tantangan dalam mengakses KUR secara optimal akibat fluktuasi harga komoditas dan ketiadaan jaminan yang memadai.

Solusi untuk mengatasi ketimpangan ini, pemerintah dan lembaga keuangan perlu memperkuat infrastruktur keuangan di wilayah tertinggal, seperti melalui pembukaan cabang bank mikro, pemanfaatan teknologi digital, dan program pendampingan UMKM. Literasi keuangan juga harus ditingkatkan untuk memastikan pemanfaatan KUR yang lebih produktif. Pemerintah perlu memastikan bahwa penyaluran KUR tidak hanya sekadar kuantitas, tetapi juga berkualitas dengan fokus pada peningkatan kapasitas usaha mikro yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Upaya ini akan mendorong pemerataan ekonomi sekaligus meningkatkan kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) secara nasional.

Secara nasional, tahun 2018 sampai 2019 penyaluran KUR di Indonesia mengalami peningkatan signifikan. Kebijakan ini disebabkan oleh penurunan suku bunga yang awalnya berada di atas 10% menjadi sekitar 7% pada 2018 dan 6% pada 2019, menjadikan KUR lebih terjangkau bagi UMKM. Selain itu, pemerintah melonggarkan persyaratan kredit, memperbesar alokasi dana, dan memperluas jangkauan KUR untuk membantu sektor produktif, seperti pertanian, perdagangan, dan perikanan. Melalui upaya ini, KUR menjadi salah satu instrumen utama dalam mendukung ekonomi mikro dan mendorong pertumbuhan UMKM di seluruh Indonesia (Jurnal et al., 2022). Tahun 2020 sampai 2021, penyaluran KUR difokuskan sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi Indonesia akibat pandemi COVID-19. Upaya membantu UMKM bertahan, pemerintah meningkatkan alokasi dana KUR dan menurunkan suku bunga KUR hingga 3% sementara. Selain itu, ada relaksasi syarat dan kebijakan untuk mempermudah akses, serta subsidi bunga yang ditambah sebagai insentif. Akibat relaksasi tersebut, UMKM di sektor terdampak pandemi, seperti perdagangan, pertanian, dan perikanan, yang mendapatkan akses lebih mudah ke pembiayaan dengan KUR (Dwiyanto dan Lestari, 2023).

Peningkatan signifikan penyaluran KUR di Indonesia pada tahun 2022 dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, pemerintah memberikan subsidi bunga yang lebih besar, menurunkan tingkat bunga efektif KUR menjadi 3% hingga pertengahan 2022, sehingga menarik lebih banyak pelaku usaha untuk memanfaatkan program ini. Pemerintah menaikkan alokasi plafon KUR secara

signifikan. Plafon KUR 2022 mencapai 373,17 triliun rupiah, lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Penurunan penyaluran KUR pada tahun 2023 disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya perubahan kebijakan dalam penyaluran yang lebih selektif serta kondisi ekonomi global yang berdampak pada ketidakpastian ekonomi lokal. Selain itu, adanya persyaratan yang lebih kompetitif untuk sektor-sektor tertentu membuat akses terhadap KUR lebih terbatas. Meskipun permintaan masih tinggi, beberapa lembaga penyalur melakukan evaluasi risiko lebih ketat untuk menjaga kualitas kredit dan mengurangi potensi kredit macet (Amaliyah dan Hetika, 2024).

Berdasarkan data OJK (2024), penggunaan KUR di Indonesia lebih banyak dialokasikan untuk keperluan investasi, khususnya dalam bentuk modal kerja dan pembelian aset produktif bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Program KUR dirancang untuk meningkatkan kapasitas produksi sektor riil, seperti pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan. Sebagai contoh, di Jawa Barat pada semester I tahun 2024, sektor perdagangan besar dan eceran mendominasi penyaluran KUR dengan nilai Rp6,16 triliun atau sekitar 56,62% dari total penyaluran, menunjukkan fokus pada kegiatan usaha produktif. Berdasarkan data tersebut, jika dikaitkan dengan konteks *Keynesian Cross Diagram*, KUR yang mempengaruhi sisi investasi dapat dijelaskan melalui perannya dalam meningkatkan pengeluaran agregat (AE) melalui komponen investasi (I). KUR menyediakan pembiayaan bagi UMKM untuk mengembangkan usahanya, seperti membeli peralatan, memperluas kapasitas produksi, atau meningkatkan efisiensi operasional. Investasi ini meningkatkan total permintaan agregat, yang dalam diagram *Keynesian Cross* tercermin sebagai pergeseran ke atas pada garis AE. Pergeseran ini mengindikasikan kenaikan pengeluaran di seluruh tingkat pendapatan nasional (Y), yang selanjutnya mendorong pertumbuhan ekonomi.

Penyaluran KUR berpengaruh positif terhadap perekonomian Indonesia, terutama di sektor UMKM, yang merupakan sektor kunci ekonomi nasional. KUR memungkinkan pelaku usaha kecil untuk mengakses modal dengan bunga rendah, sehingga meningkatkan produksi, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Program ini juga berperan dalam memperkuat

inklusi keuangan, terutama di daerah pedesaan, yang selama ini sulit mengakses pembiayaan formal. Peningkatan daya saing dan kapasitas UMKM ini KUR turut berkontribusi pada stabilitas ekonomi secara nasional (Cahyawati et al., 2023).

Penelitian yang dilakukan oleh Khoiriah et al., (2024) menemukan hal yang berbeda. Penyaluran KUR mungkin tidak berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi jika terdapat beberapa kendala, seperti ketidakefisienan dalam distribusi atau ketidaksesuaian dengan kebutuhan sektor usaha. Jika KUR lebih banyak disalurkan pada sektor yang kurang produktif atau konsumtif, kontribusi terhadap peningkatan output nasional menjadi terbatas.

Selain itu, tantangan dalam pengelolaan kredit macet atau kurangnya kesiapan pelaku usaha untuk memanfaatkan dana secara optimal juga dapat menghambat dampak positif KUR terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah

1. Apakah P2P lending berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia?
2. Apakah KUR berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia?
3. Apakah P2P lending dan KUR berpengaruh secara bersama-sama terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh P2P *Lending* terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh P2P *Lending* dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1 Teori Pertumbuhan Keynesian

Teori pertumbuhan Keynesian adalah pendekatan ekonomi yang menekankan pentingnya permintaan agregat dalam menentukan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Berdasarkan pandangan Keynesian, tingkat investasi yang dilakukan oleh sektor swasta, pengeluaran pemerintah, dan ekspor neto merupakan pendorong utama pertumbuhan output. Berbeda dengan teori pertumbuhan neoklasik yang berfokus pada faktor-faktor seperti akumulasi modal dan kemajuan teknologi, teori Keynesian menempatkan perhatian besar pada bagaimana permintaan total mendorong kapasitas produktif ekonomi (Mankiw, 2013a).

Kunci utama teori ini adalah efek multiplier, yaitu bagaimana pengeluaran awal dalam ekonomi menghasilkan dampak berlipat ganda pada pendapatan dan output. Misalnya, peningkatan investasi oleh sektor swasta atau pengeluaran pemerintah dapat memicu peningkatan pendapatan masyarakat, yang pada gilirannya meningkatkan konsumsi dan investasi lebih lanjut. Kerangka ini menerangkan kebijakan fiskal seperti pengeluaran pemerintah dan pemotongan pajak dianggap sebagai alat yang efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama di masa resesi atau ketika ekonomi mengalami output di bawah kapasitas penuh.

Teori Keynesian juga mencakup gagasan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat terhambat oleh kurangnya permintaan efektif. Jika rumah tangga atau perusahaan enggan membelanjakan pendapatannya, maka ekonomi dapat mengalami stagnasi meskipun faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal tersedia.

Maka dari itu, intervensi pemerintah melalui kebijakan fiskal dan moneter dianggap penting untuk menjaga pertumbuhan yang stabil dan menghindari siklus

penurunan ekonomi yang berkepanjangan. Teori ini relevan dalam menjelaskan pentingnya kebijakan proaktif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Berdasarkan teori pertumbuhan Keynesian, pertumbuhan ekonomi dijelaskan melalui pengaruh investasi, konsumsi, dan permintaan agregat terhadap pendapatan dan output. Secara matematis, persamaan yang sering digunakan untuk menggambarkan inti teori ini adalah:

$$Y = C + I + G + (X-M)$$

Dimana

- Y (Pendapatan Nasional): Merupakan jumlah total nilai dari seluruh barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu perekonomian.
- C (Konsumsi): Merujuk pada seluruh pengeluaran rumah tangga untuk membeli barang dan jasa.
- I (Investasi): Menggambarkan pengeluaran sektor swasta untuk pengadaan aset fisik seperti mesin, gedung, dan infrastruktur.
- G (Pengeluaran Pemerintah): Menunjukkan total belanja pemerintah untuk menyediakan barang dan layanan publik.
- (X-M) (Ekspor Neto): Adalah selisih antara nilai ekspor (X) dan impor (M), yang mencerminkan kontribusi perdagangan internasional terhadap perekonomian.

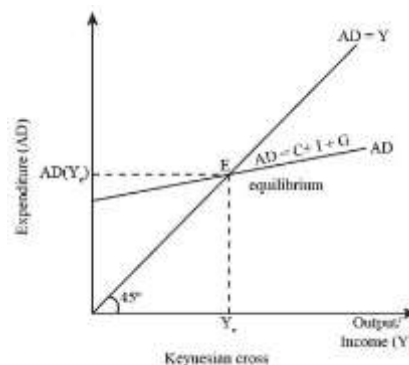
Keynesian Cross Diagram

Keynesian Cross atau diagram silang Keynes adalah model sederhana yang digunakan dalam teori Keynesian untuk menunjukkan keseimbangan pendapatan nasional (output) berdasarkan pengeluaran agregat dalam suatu ekonomi.

Model ini menggambarkan bagaimana tingkat pengeluaran agregat yang direncanakan (planned aggregate expenditure, AE) berinteraksi dengan pendapatan nasional (Y) untuk menentukan tingkat output ekuilibrium. Pendekatan ini menjadi alat penting untuk memahami pengaruh kebijakan fiskal dan faktor lain terhadap pendapatan nasional, khususnya dalam jangka pendek (Mankiw, 2013b).

Model ini terdiri dari dua elemen utama: garis 45 derajat dan kurva pengeluaran agregat (AE). Garis 45 derajat menunjukkan titik-titik di mana pengeluaran agregat sama dengan pendapatan nasional ($AE=YAE=Y$). Sementara itu, kurva AE mencerminkan jumlah pengeluaran yang direncanakan pada berbagai tingkat pendapatan. Pengeluaran agregat terdiri dari komponen konsumsi (C), investasi (I), pengeluaran pemerintah (G), dan ekspor neto ($X-MX-M$). Titik perpotongan antara garis AE dan garis 45 derajat menandai titik keseimbangan ekonomi, di mana total pengeluaran yang direncanakan sama dengan total output yang dihasilkan.

Terkait konteks kebijakan ekonomi, Keynesian Cross menunjukkan bagaimana kebijakan fiskal dapat memengaruhi keseimbangan pendapatan nasional. Misalnya, peningkatan pengeluaran pemerintah atau investasi akan menggeser kurva AE ke atas, sehingga meningkatkan tingkat output ekuilibrium. Sebaliknya, jika pengeluaran agregat menurun, ekonomi dapat berada di bawah tingkat output potensialnya, yang mengindikasikan resesi. Maka dari itu, model ini menekankan pentingnya peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi melalui pengelolaan permintaan agregat.



Gambar 2.1 Keynesian Cross Diagram

2.2 Pertumbuhan Ekonomi

Menurut BPS (2021), pertumbuhan ekonomi suatu negara diukur berdasarkan peningkatan produksi barang dan jasa pada tahun tertentu dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang dihitung menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga konstan. Todaro dan Smith (2019) menyebutkan bahwa terdapat

tiga faktor utama yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu: (1) akumulasi modal, yakni investasi baru baik dalam bentuk fisik, nonfisik, maupun peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang secara langsung dapat meningkatkan produktivitas; (2) pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja, di mana bertambahnya jumlah penduduk akan memperluas tenaga kerja yang tersedia; dan (3) kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mendorong inovasi dan meningkatkan efisiensi produksi.

PDB juga digunakan sebagai indikator pendapatan nasional. Salah satu cara untuk menghitung pendapatan nasional adalah melalui pendekatan pengeluaran, sebagaimana dijelaskan oleh Mankiw (2020).

$$Y = C + I + G + (X - M)$$

di mana:

Y = PDB
 C = Konsumsi
 I = Investasi
 G = Pengeluaran pemerintah
 X = Ekspor
 M = Impor

Pendapatan nasional dari pendekatan pengeluaran memiliki keterkaitan erat dengan P2P *Lending* dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) karena keduanya berperan sebagai instrumen pembiayaan yang dapat memengaruhi komponen utama dalam persamaan tersebut. Akses pembiayaan melalui P2P *Lending* dan KUR, rumah tangga memiliki kemampuan tambahan untuk membiayai kebutuhan konsumsi. Kredit yang diberikan memungkinkan pelaku usaha meningkatkan pendapatan, yang kemudian dialokasikan sebagian untuk konsumsi pribadi. Peningkatan konsumsi rumah tangga akan meningkatkan permintaan barang dan jasa, yang mendorong pertumbuhan ekonomi.

Banyak UMKM menggunakan pendanaan dari P2P *Lending* untuk investasi produktif, seperti pembelian peralatan baru, pengembangan teknologi, dan ekspansi usaha. Kredit dengan suku bunga rendah mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan skala produksi dan efisiensi, yang merupakan bentuk investasi. Perbaikan investasi produktif meningkatkan kapasitas produksi dan mendorong

pertumbuhan ekonomi jangka panjang. P2P *Lending* dan KUR berperan penting dalam memperkuat komponen konsumsi dan investasi, yang menjadi penggerak utama dalam pertumbuhan ekonomi.

2.3 Financial Technology (Fintech)

Teknologi Finansial (Fintech) adalah penggunaan teknologi modern untuk meningkatkan layanan keuangan, membuatnya lebih cepat, efisien, inklusif, dan mudah diakses (Pham et al., 2024). Fintech mencakup berbagai aplikasi, mulai dari pembayaran digital, pinjaman daring (P2P lending), investasi berbasis teknologi, hingga asuransi digital. Kehadiran fintech telah merevolusi cara individu dan bisnis mengakses serta memanfaatkan layanan keuangan.

Fintech merupakan pemanfaatan perangkat lunak dan platform digital untuk menyediakan layanan keuangan kepada konsumen. Financial Technology memiliki potensi yang sangat besar, karena mampu menghadirkan layanan keuangan yang lebih cepat, andal, dan efisien dibandingkan model bisnis tradisional (Al Kasasbeh et al., 2023). Dalam era digital, industri keuangan mengalami kemajuan pesat, dan salah satu inovasi yang berkembang signifikan adalah digitalisasi cicilan sebagai bagian dari bisnis fintech di Indonesia. Perkembangan fintech mendapat perhatian serius dari otoritas publik dan diharapkan dapat memberdayakan masyarakat dengan memperluas akses terhadap layanan keuangan. Fintech juga mencerminkan kemajuan teknologi dalam sektor keuangan melalui berbagai aplikasi, proses, dan sistem yang berdampak nyata terhadap pengelolaan layanan keuangan (Paulus Tahu dan Verawati, 2024).

2.4 P2P Lending (Peer to Peer Lending)

Saat ini, berbagai aktivitas dilakukan dengan dukungan teknologi, termasuk layanan pinjam meminjam yang berlangsung secara langsung melalui platform daring tanpa perantara (Chen et al., 2014), khususnya bagi mereka yang tidak terlayani oleh lembaga keuangan konvensional. Peer-to-peer (P2P) lending adalah layanan keuangan yang mempertemukan pemberi dan penerima pinjaman dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik berbasis internet

(POJK No. 77/POJK.01/2016). Menurut Gonzalez (2018), P2P lending adalah aktivitas pinjam meminjam antar individu melalui platform daring nirlaba, tanpa keterlibatan lembaga keuangan tradisional, meskipun lembaga tersebut dapat ikut serta sebagai pemberi pinjaman. Bachman et al. (2011) menambahkan bahwa P2P lending memanfaatkan jejaring sosial dalam platform online untuk menghubungkan pengusaha dan investor, sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses pendanaan (Pailaha et al., 2023a).

Dari berbagai konsep tersebut, dapat disimpulkan bahwa P2P *lending* adalah sistem pinjam meminjam digital yang menghubungkan pemberi dana dengan peminjam tanpa perantara pihak ketiga.

Selain menjelaskan definisi dan konsep teoritis, peneliti juga menguraikan pihak-pihak yang terlibat dalam P2P lending. Menurut Bachman et al. (2011), terdapat enam pemangku kepentingan utama, yaitu:

- *Lenders*: individu yang menyediakan dana pinjaman dengan harapan imbal hasil tertentu dan risiko yang diperhitungkan.
- *Borrowers*: pihak yang menerima pinjaman dan memiliki potensi gagal bayar.
- *Platform*: situs atau sistem P2P lending yang menjembatani lenders dan borrowers.
- *Regulatory Authorities*: lembaga yang mengatur regulasi dan ketentuan hukum terkait.
- *Partner Banks*: bank mitra yang mendukung proses pemberian pinjaman.
- *Credit Bureaus*: lembaga yang memverifikasi data peminjam sebagai pengawasan eksternal.

Dampak positif P2P lending adalah meningkatnya akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha kecil yang sebelumnya sulit mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan konvensional. Melalui platform digital, proses pengajuan pinjaman menjadi lebih cepat, mudah, dan transparan tanpa memerlukan jaminan besar. Hal ini mendorong pertumbuhan sektor UMKM, memperluas inklusi keuangan, serta mendukung peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, bagi investor, P2P lending memberikan peluang diversifikasi

investasi dengan potensi imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan instrumen keuangan tradisional.

Dampak negatif P2P lending muncul ketika pengawasan dan manajemen risiko tidak berjalan optimal. Risiko gagal bayar dari peminjam (borrower) dapat merugikan investor karena tidak adanya jaminan yang kuat. Selain itu, banyaknya platform ilegal dan kurangnya literasi keuangan masyarakat membuat sebagian pengguna terjebak pada pinjaman berbunga tinggi. Kondisi ini bisa menyebabkan masalah sosial seperti overindebtedness (terlilit utang berlebih) dan ketidakstabilan finansial individu. Oleh karena itu, regulasi dan edukasi finansial menjadi sangat penting untuk meminimalkan dampak negatif tersebut.

2.5 Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan bentuk pembiayaan modal kerja dan/atau investasi yang ditujukan kepada individu, badan usaha, maupun kelompok usaha yang bergerak di sektor produktif dan memiliki kelayakan usaha, namun tidak memiliki agunan tambahan atau hanya memiliki agunan yang terbatas. KUR diperuntukkan bagi pelaku UMKM dan koperasi yang bergerak di sektor-sektor produktif seperti pertanian, perikanan, kelautan, industri, kehutanan, serta jasa keuangan simpan pinjam. Penyaluran KUR dapat dilakukan langsung melalui kantor cabang maupun unit pelayanan dari bank penyalur.

Sementara itu, Widiastuti (2017) menjelaskan bahwa KUR merupakan bentuk pembiayaan modal kerja atau investasi kepada pelaku UMKM yang layak secara usaha namun menghadapi kendala dalam memenuhi persyaratan perbankan, sehingga diberikan dukungan berupa fasilitas penjaminan untuk meningkatkan akses pembiayaan.

Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pertama kali dirumuskan dalam Rapat Kabinet Terbatas pada 9 Maret 2007 di Kantor Kementerian Negara Koperasi dan UKM, di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam rapat tersebut, pemerintah memutuskan untuk mendorong pengembangan UMKM dan koperasi dengan meningkatkan akses mereka terhadap pembiayaan perbankan melalui penguatan peran perusahaan penjamin. Program KUR secara resmi

diluncurkan pada 5 November 2007, dan pelaksanaannya diperkuat melalui Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi 2008–2009. Untuk mempercepat implementasi KUR, pemerintah menyediakan berbagai kemudahan bagi pelaku UMKM, termasuk mekanisme penyelesaian kredit bermasalah. Dukungan tersebut juga diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.05/2008 mengenai fasilitas penjaminan KUR.

Menurut Pratama dan Fernos (2019), agar kredit yang disalurkan dapat berjalan lancar, bank perlu bersikap selektif dalam memberikan pinjaman kepada debitur. Sebelum kredit disetujui, bank harus melakukan analisis menyeluruh untuk menilai kemampuan debitur dalam melunasi pinjaman sesuai dengan ketentuan perjanjian. Oleh karena itu, penting bagi bank untuk menetapkan prosedur kredit yang jelas dan mengantisipasi potensi risiko kredit macet, karena hal tersebut berdampak langsung pada kinerja operasional dan efektivitas penyaluran kredit dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.

2.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Ringkasan Hasil Penelitian

No.	Peneliti / Judul	Alat Analisis/Variabel	Hasil
1	Miftah Khairi Amrillah dan Telisa Aulia Falianty (2024) Judul: <i>Does P2P Lending Have An Impact on Regional Economic Growth? Evidence From Java Provinces</i>	Alat Analisis: Data Panel Variabel: 1. Pertumbuhan ekonomi 2. P2P Lending	Dampak P2P <i>lending</i> terhadap pertumbuhan PDRB riil cukup signifikan dan positif, dengan besaran 0,0754%. Meskipun ada dampak positif, masih banyak tantangan yang perlu diatasi dalam industri P2P <i>lending</i> .
2	Yasir Maulana dan Herma Wiharno (2022) Judul: <i>Fintech P2P Lending dan Pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia</i>	Alat Analisis: OLS Variabel: 1. Pertumbuhan ekonomi 2. P2P Lending	Hasil analisis regresi sederhana, uji-t, dan koefisien determinasi mengungkapkan bahwa peer-to-peer (P2P) <i>lending</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sebesar 74,60% variasi dalam pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan oleh perkembangan P2P

No.	Peneliti / Judul	Alat Analisis/Variabel	Hasil
			lending. Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan aktivitas P2P lending berkontribusi secara nyata dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi nasional.
3	Erya P. Pailaha et al. (2023) Judul: Pengaruh Fintech <i>Peer to Peer Lending</i> dan Pembayaran Digital Uang Elektronik terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia	Alat Analisis: OLS Variabel: Pertumbuhan ekonomi <i>P2P Lending</i> Uang Elektronik	Hasil penelitian mengungkapkan bahwa fintech peer to peer lending tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sebaliknya, penggunaan pembayaran digital melalui uang elektronik terbukti berpengaruh positif dan signifikan. Secara simultan, kedua variabel tersebut secara bersama-sama berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
4	Rully Dwiyanto. dan Nur Indah Lestari (2023) Judul: Analisis Pengaruh Kredit Usaha Rakyat Sektor Pertanian Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Penurunan Kemiskinan di Indonesia	Alat Analisis: Data Panel Variabel: Pertumbuhan ekonomi KUR	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kredit Usaha Rakyat (KUR) di sektor pertanian memberikan dampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sektor pertanian sebesar 0,025%, meskipun tidak signifikan pada tingkat agregat. Selain itu, KUR juga berkontribusi secara signifikan dalam menurunkan jumlah penduduk miskin di Indonesia sebesar 0,017%, namun pengaruhnya tidak signifikan di wilayah pedesaan.
5	Barbara Koranteng dan Kefei You (2025) Judul: <i>Does P2P lending promote the traditional bank-based financial inclusion? Spatial evidence from 34 developing economies</i>	Alat Analisis: Spatial Econometric Model Variabel: <i>P2P Lending</i> (perkembangan dan volume P2P lending di negara berkembang) <i>Traditional Bank-based Financial Inclusion</i> (indikator inklusi keuangan berbasis perbankan tradisional)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa P2P lending berpengaruh positif terhadap inklusi keuangan tradisional, baik di dalam negeri maupun di negara tetangga.
6	Barata Surya (2021)	Alat Analisis: OLS	Berdasarkan temuan penelitian ini, disarankan

No.	Peneliti / Judul	Alat Analisis/Variabel	Hasil
	Judul: <i>Economic Growth, Increasing Productivity of SMEs, and Open Innovation</i>	Variabel: Pertumbuhan Ekonomi KUR	agar pemerintah mengadopsi strategi pertumbuhan ekonomi yang berorientasi pada inovasi teknologi sebagai landasan dalam pengambilan kebijakan, guna mendorong peningkatan produktivitas usaha masyarakat di Kota Makassar, Indonesia.
7	Gabriella Lavenia Sutjion (2024) Judul: <i>Fintech Peer-to-Peer Lending, E-Money and Indonesia's Economic Growth</i>	Alat Analisis: OLS Variabel: P2P Lending E-Money Inflasi Suku Bunga Pertumbuhan Ekonomi	Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel P2P lending, uang elektronik (e-money), inflasi, dan suku bunga secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
8	Mangasa Augustinus Sipahutar (2018) Judul: <i>Effects of Credit on Economic Growth, Unemployment and Poverty</i>	Alat Analisis: ECM Variabel: KUR Pertumbuhan Ekonomi Pengangguran Kemiskinan	Hasil estimasi menunjukkan bahwa penyaluran KUR oleh perbankan berkontribusi pada peningkatan aktivitas sektor riil, yang selanjutnya mendorong pertumbuhan ekonomi, menekan tingkat pengangguran melalui peningkatan permintaan tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan pada akhirnya berperan dalam pengurangan angka kemiskinan.

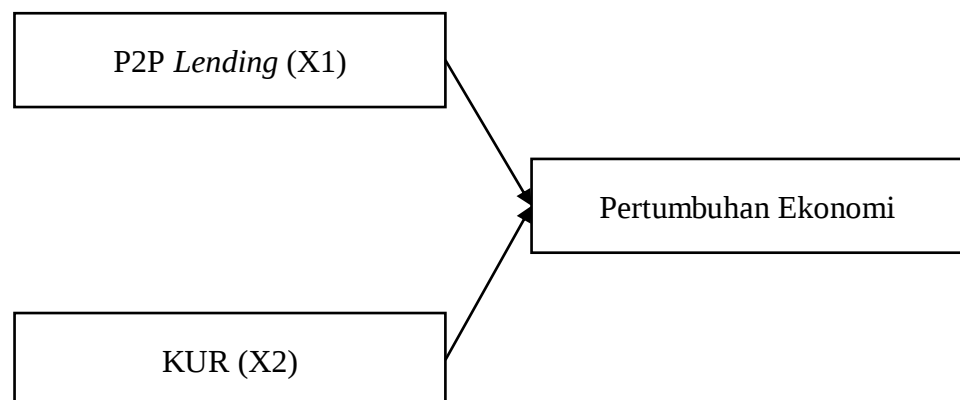
2.7 Kerangka Pemikiran

P2P *lending* (*peer-to-peer lending*) berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, terutama melalui penyediaan akses pembiayaan yang mendorong investasi pada barang-barang modal. P2P *lending* memungkinkan pelaku usaha, terutama UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), untuk mendapatkan pendanaan yang lebih mudah dibandingkan dengan sistem perbankan konvensional. Dana yang diperoleh ini sering digunakan untuk membeli mesin atau alat produksi yang meningkatkan kapasitas dan efisiensi usaha. Modal tambahan memungkinkan pengusaha membangun fasilitas produksi baru, seperti gudang atau pabrik. Peningkatan investasi pada barang modal, kapasitas produksi bertambah, yang berkontribusi langsung pada peningkatan

produk domestik bruto (PDB). *P2P lending* dapat menciptakan *multiplier effect* pada ekonomi, memperkuat sektor produktif, dan mempercepat pembangunan ekonomi nasional.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah program pembiayaan bersubsidi pemerintah Indonesia yang dirancang untuk membantu UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) mengakses sumber pendanaan dengan suku bunga rendah. Program ini berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, terutama melalui peningkatan barang modal di masyarakat. Salah satu tantangan utama UMKM adalah keterbatasan akses terhadap pembiayaan untuk investasi pada barang modal.

KUR memberikan solusi dengan menyediakan kredit dengan suku bunga rendah memudahkan pelaku usaha mengajukan pembiayaan. Prosedur KUR lebih sederhana dibandingkan dengan pinjaman bank konvensional lainnya. KUR memungkinkan masyarakat mengalihkan penggunaan sumber daya dari konsumsi ke investasi produktif. Tambahan barang modal, pelaku usaha dapat meningkatkan skala usaha dengan pembelian barang modal seperti mesin atau kendaraan operasional membantu meningkatkan skala produksi.



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

2.8 Hipotesis

Berdasarkan telaah literatur dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. P2P Lending diduga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di seluruh provinsi di Indonesia.
2. Kredit Usaha Rakyat (KUR) diduga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di seluruh provinsi di Indonesia.
3. P2P Lending dan KUR secara simultan diduga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di seluruh provinsi di Indonesia.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian dan Sumber Data

3.1.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder, yaitu data yang telah dikompilasi dan dipublikasikan oleh instansi resmi yang relevan dengan topik penelitian. Jenis data yang digunakan berupa data panel, yang merupakan gabungan antara data runtut waktu (*time series*) untuk periode 2018–2023 dan data silang (*cross section*) dari 34 kabupaten/kota di Indonesia.

3.1.2 Sumber Data

Penelitian ini mengidentifikasi 34 kabupaten/kota di Indonesia. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel yang didapat dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) masing-masing daerah yang dipublikasikan pada *website* resmi.

Tabel 3.1 Deskripsi Data

Nama Variabel	Simbol	Satuan Ukuran	Sumber Data
Pertumbuhan Ekonomi	PE	Persen	BPS
P2P <i>Lending</i>	P2P	Triliun Rupiah	OJK
Kredit Usaha Rakyat	KUR	Triliun Rupiah	OJK

3.2 Definisi dan Operasional Variabel

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

3.2.1 Pertumbuhan Ekonomi (Y)

Pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini diproksikan melalui pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) masing-masing kabupaten/kota. PDRB

dipilih karena merepresentasikan output akhir dari berbagai sektor ekonomi. Penelitian ini menggunakan PDRB atas dasar harga konstan, yang mencerminkan nilai tambah barang dan jasa dengan mengacu pada harga tetap pada tahun tertentu, sehingga memungkinkan analisis pertumbuhan ekonomi antarwaktu secara lebih akurat. Data pertumbuhan ekonomi yang dianalisis bersifat tahunan dan diperoleh dari situs resmi Badan Pusat Statistik (BPS) untuk periode 2018–2023.

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{\text{PDRB}_t - \text{PDRB}_{t-1}}{\text{PDRB}_{t-1}} \times 100\%$$

dimana:

PDRB_t = PDRB tahun t

PDRB_{t-1} = PDRB tahun sebelumnya

3.2.2 P2P Lending (X1)

Peer to Peer (P2P) Lending merupakan layanan keuangan berbasis teknologi informasi yang mempertemukan pihak pemberi pinjaman (*lender*) dengan penerima pinjaman (*borrower*) secara langsung melalui platform digital. Dalam penelitian ini, data P2P Lending yang digunakan bersifat tahunan dan diperoleh dari situs resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk periode 2018–2023.

3.2.3 KUR (X2)

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan atau lembaga keuangan lainnya kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), termasuk koperasi, guna mendukung pembiayaan kegiatan produktif. Dalam penelitian ini, data KUR yang digunakan bersifat tahunan dan diperoleh dari situs resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk periode 2018–2023.

3.3 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode panel dinamis *Generalized Method of Moment* (GMM). Berbeda dengan penerapan regresi data panel statis yang dilakukan untuk mengetahui hubungan jangka pendek, penerapan regresi data panel dinamis bisa diterapkan guna

menjelaskan hubungan jangka panjang dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Hal ini sesuai penggunaan variabel pertumbuhan ekonomi yang analisisnya diperlukan dalam jangka panjang.

Generalized Method of Moments (GMM) merupakan metode yang sangat bermanfaat untuk analisis data panel dinamis, terutama dalam mengatasi permasalahan endogenitas, efek tetap, dan heteroskedastisitas. Keunggulan utama GMM adalah kemampuannya menggunakan instrumen internal, yaitu variabel yang berasal dari data itu sendiri, seperti lag dari variabel independen atau dependen. Hal ini memungkinkan GMM untuk menghasilkan estimasi yang konsisten meskipun terdapat korelasi antara variabel independen dengan error term. Selain itu, GMM dirancang untuk menangani data dengan banyak individu tetapi pengamatan waktu yang relatif sedikit (N besar, T kecil), yang sering terjadi pada data panel. Metode ini juga mampu mengontrol heterogenitas individual yang tidak terobservasi, sehingga memberikan hasil yang lebih akurat dalam analisis hubungan dinamis antar variabel (Widarjono, 2019).

Penelitian ini menggabungkan data *cross section* serta *time series*, sehingga membentuk data panel. Tujuan penggunaan analisis ini ialah mengkaji hubungan satu variabel terikat bersama variabel-variabel lain yang mengikatnya atau variabel bebasnya guna mencari hubungan variabel terikat dan variabel pengikatnya dan seberapa besar pengaruh yang diberikan variabel bebas kepada variabel terikat.

Regresi data panel dinamis merupakan pendekatan yang mengakomodasi sifat kedinamisan data, di mana nilai variabel pada periode saat ini dipengaruhi oleh nilai variabel tersebut pada periode sebelumnya. Metode ini umum digunakan dalam analisis ekonomi karena banyak variabel ekonomi bersifat dinamis.

Dalam model ini, variabel dependen yang dilambatkan (lag) turut digunakan sebagai variabel independen. Pendekatan dinamis ini menunjukkan bahwa nilai suatu variabel tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi saat ini, tetapi juga memiliki keterkaitan dengan nilai di masa lalu (Arellano & Bond, 1991). Model regresi panel dinamis dapat dirumuskan dalam bentuk persamaan sebagai berikut:

$$y_{i,t} = \delta y_{i,t-1} + x'_{i,t} \beta + u_{i,t} ; i = 1, 2, \dots, N ; t = 1, 2, \dots, T$$

Keterangan:

$y_{i,t}$: variabel dependen pada unit *cross-section* ke-i terhadap periode waktu t

$x'_{i,t}$: vektor variabel independen pengamatan unit *cross-section* ke-I untuk periode waktu t berukuran K

$u_{i,t}$: anggota *error*

3.3.1 Metode Regresi Panel *Generalized Method of Moment* (GMM)

Pengujian spesifikasi model diterapkan untuk memastikan model data panel dinamis menggunakan penerapan *Generalized Method of Moments* (GMM) sempurna guna memenuhi kriteria berupa:

1. Tidak bias. Estimator dari *Pooled Least Square* bersifat *biased upwards*, sedangkan estimator dari *Fixed Effect Model* bersifat *biased downward*. Penerapan *Generalized Method of Moments* (GMM) adalah tepat jika nilainya berada diantara keduanya.
2. Instrumental valid. Untuk memastikan instrumental tersebut valid atau tidak, maka diperlukan pengujian validitas dengan menggunakan sargan statistic.
3. Konsisten. Keputusan mengenai konsisten tidaknya data dapat dilakukan dengan melihat statistic dari *Arellano-Bond*. Keputusan yang diambil dapat dilihat pada AR (1) dan AR (2) yang dihasilkan. Data tersebut dikatakan terbebas dari masalah autokorelasi jika AR (2) lebih besar dari 0,05.

Penelitian ini mengadopsi model regresi data panel dinamis dengan pendekatan *First Differences Generalized Method of Moments* (FD-GMM), dan pengolahan data dilakukan menggunakan perangkat lunak E-Views 12. Adapun spesifikasi model yang digunakan dalam penelitian ini dirumuskan dalam persamaan sebagai berikut:

$$PE_{it} = \beta_0 + \beta_1 PE_{it-1} + \beta_2 P2P_{it} + \beta_3 KUR_{it} + \varepsilon_{it}$$

dimana:

PE_{it}	= Pertumbuhan Ekonomi
PE_{it-1}	= Pertumbuhan Ekonomi periode sebelumnya
β_0 - β_5	= Konstanta
$P2P_{it}$	= P2P Lending
KUR_{it}	= KUR

i = unit sektor
t = unit waktu

Penggunaan variabel $\beta_1 PE_{it-1}$ atau *lag* dari pertumbuhan ekonomi (PE) bertujuan untuk menangkap efek dinamika atau pengaruh masa lalu terhadap kondisi ekonomi saat ini. Dalam konteks model, pertumbuhan ekonomi periode sebelumnya sering kali memengaruhi pertumbuhan pada periode berikutnya karena adanya faktor keterlambatan penyesuaian (*adjustment lag*). Dengan memasukkan PE_{it-1} , model menjadi lebih realistis dalam merepresentasikan proses ekonomi yang bersifat dinamis dan tidak statis, serta membantu mengurangi bias spesifikasi dengan mempertimbangkan pengaruh historis terhadap kinerja ekonomi saat ini.

3.3.2 Metode Estimasi Regresi Data Panel

Estimasi pada data panel umumnya dilakukan dengan menggunakan salah satu dari tiga pendekatan utama, yaitu *Pooled Least Squares* (PLS), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Ketiga metode ini memiliki karakteristik dan asumsi yang berbeda secara fundamental. Berikut merupakan penjelasan masing-masing pendekatan:

a. Metode *Pooled Least Square* (PLS)

Estimasi dengan metode *Pooled Least Squares* (PLS) merupakan pendekatan paling sederhana dalam analisis data panel, yang dilakukan dengan menggabungkan data *cross section* dan *time series* tanpa mempertimbangkan perbedaan antar individu maupun dimensi waktu. Estimasi dilakukan menggunakan metode *Ordinary Least Squares* (OLS) konvensional. Adapun bentuk model regresi dengan pendekatan PLS disajikan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

β_0 = Koefisien intersep yang merupakan skalar
 β_1, β_2 = Koefisien slope atau kemiringan
 Y_{it} = Variabel terikat untuk individu ke-I dan unit waktu ke-t
 X_{1it}, X_{2it} = Variabel bebas individu ke-i dan unit waktu ke-t

b. Metode *Fixed Effect* (FEM)

Pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM) mengasumsikan bahwa nilai intersep dapat berbeda antar unit *cross section*, sementara kemiringan garis regresi (slope) diasumsikan tetap sama. Estimasi dalam metode ini dilakukan dengan menggunakan variabel dummy untuk merepresentasikan perbedaan karakteristik masing-masing unit *cross section*. Variabel dummy bernilai 1 jika pengaruh ada, dan 0 jika tidak. Tujuan penggunaan dummy adalah untuk menangkap variasi intersep antar individu. Model ini dikenal sebagai *Least Squares Dummy Variable* (LSDV), dengan bentuk persamaan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 D_{1it} + \beta_4 D_{4it} + \beta_n D_{nit} + \varepsilon_{it}$$

dimana:

- β_0 = Koefisien intersep yang merupakan scalar
- $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ = Koefisien slope atau kemiringan
- Y_{it} = Variabel terikat untuk individu ke-i dan unit waktu ke-t
- $X_{1it}, X_{2it}, \dots, X_{nit}$ = Variabel bebas individu ke-i dan unit waktu ke-t
- $D_1, D_2, \dots, D_n$ = 1 untuk *cross section* yang berpengaruh dan 0 untuk *cross section* yang tidak berpengaruh.

c. Metode *Random Effect* (REM)

Random Effect Model (REM) memanfaatkan pendekatan melalui komponen error (error term) untuk menangkap variasi yang muncul antar individu (*cross section*) maupun antar waktu (*time series*). Pendekatan ini lebih berfokus pada perbedaan individual dan temporal tanpa harus menggunakan variabel dummy secara eksplisit. Tidak seperti FEM yang mengandalkan variabel dummy dan berpotensi mengurangi derajat kebebasan (*degree of freedom*), REM dirancang untuk meningkatkan efisiensi estimasi parameter. Adapun formulasi model REM dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \mu_{it}$$

Dengan memperlakukan β_0 sebagai fixed, kita mengasumsikan bahwa konstanta adalah variabel acak dengan nilai rata-rata β . Dan nilai konstanta untuk masing-masing unit cross-section dapat dituliskan sebagai:

$$\beta_{0i} = \beta + \varepsilon_i \quad i = 1, 2, \dots, N$$

dimana ε_i adalah *random error term* dengan nilai rata-rata adalah nol dan variasi adalah σ^2_{ε} (konstan). Secara esensial, kita ingin mengatakan bahwa semua individu yang masuk ke dalam sampel diambil dari populasi yang lebih besar dan mereka memiliki nilai rata-rata yang sama untuk *intercept* (β_0) dan perbedaan individual dalam nilai *intercept* setiap individu akan direfleksikan dalam *error term* (μ_i).

Dengan demikian persamaan REM awal dapat dituliskan kembali menjadi:

$$Y_{it} = \beta_{0i} + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \varepsilon_i + \mu_{it}$$

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + w_{it}$$

dimana:

$$w_{it} = \varepsilon_i + \mu_{it}$$

Dalam *Random Effect Model* (REM), komponen galat (*error term*) dilambangkan sebagai w_{it} , yang terdiri atas dua bagian, yaitu ε_i sebagai komponen galat acak antar unit *cross section*, dan μ_{it} sebagai komponen galat gabungan. Oleh karena itu, REM juga dikenal sebagai *Error Components Model* (ECM).

Menurut Gujarati dan Porter (2008), terdapat beberapa pertimbangan dalam memilih antara pendekatan *Fixed Effect* (FE) dan *Random Effect* (RE), antara lain:

- Jika jumlah observasi deret waktu (T) besar dan jumlah unit *cross section* (N) kecil, maka hasil estimasi menggunakan FE dan RE cenderung tidak berbeda secara signifikan, sehingga FE dapat dipilih karena lebih sederhana dalam perhitungan.
- Sebaliknya, jika jumlah unit *cross section* (N) besar dan T kecil, maka estimasi dari kedua metode dapat menghasilkan perbedaan yang substansial. Dalam hal ini, apabila unit cross section dianggap terpilih secara acak dari

populasi, maka pendekatan RE lebih sesuai. Namun, jika unit cross section tidak dipilih secara acak, maka pendekatan FE lebih tepat digunakan.

- Jika komponen galat individual (ϵ_i) memiliki korelasi dengan variabel independen (X), maka estimasi parameter menggunakan pendekatan *Random Effect* akan menghasilkan penduga yang bias. Sebaliknya, pendekatan *Fixed Effect* tetap memberikan penduga yang tidak bias dalam kondisi tersebut.
- Apabila jumlah unit *cross section* (N) besar dan jumlah observasi deret waktu (T) kecil, serta asumsi-asumsi dasar dari model *Random Effect* dapat dipenuhi, maka pendekatan *Random Effect* dinilai lebih efisien dibandingkan *Fixed Effect*.

3.3.3 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif menggunakan Stata bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data penelitian sebelum dilakukan analisis lanjutan. Melalui perintah seperti *summarize*, peneliti dapat memperoleh informasi tentang nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*), dan standar deviasi dari setiap variabel. Statistik deskriptif membantu memahami sebaran dan kecenderungan data, sehingga dapat diketahui apakah data memiliki variasi besar, cenderung simetris, atau terdapat outlier yang signifikan. Misalnya, jika rata-rata dan median suatu variabel berbeda jauh, hal ini dapat menunjukkan adanya kemencengan (*skewness*) dalam distribusi data.

Selain itu, Stata juga memungkinkan peneliti menampilkan statistik deskriptif dalam bentuk tabel atau grafik, seperti histogram, boxplot, maupun tabulasi frekuensi, dengan perintah seperti *tabstat*, *histogram*, atau *graph box*. Visualisasi ini membantu melihat pola distribusi data secara lebih intuitif. Hasil analisis deskriptif menjadi dasar penting dalam menentukan metode analisis berikutnya. Dengan demikian, penggunaan Stata dalam analisis statistik deskriptif tidak hanya memudahkan pengolahan data, tetapi juga meningkatkan validitas dan akurasi interpretasi hasil penelitian.

3.3.4 Uji Validitas FDGMM dan SYSGMM

Uji validitas pada model FD-GMM (*First Difference GMM*) dan SYS-GMM (*System GMM*) bertujuan untuk memastikan bahwa instrumen yang digunakan dalam model bersifat valid dan model yang diestimasi tidak mengalami masalah spesifikasi. Dalam pendekatan GMM, variabel-variabel instrumen digunakan untuk mengatasi masalah endogenitas pada model dinamis, sehingga uji validitas menjadi sangat penting. Dua uji utama yang digunakan adalah uji Sargan atau Hansen test untuk menguji validitas instrumen, serta uji Arellano-Bond (AR test) untuk mendeteksi adanya autokorelasi pada residual. Jika hasil uji Hansen menunjukkan nilai p-value yang lebih besar dari 0,05, maka instrumen dianggap valid (Gujarati, 2009).

Selain itu, uji AR(1) dan AR(2) dalam model Arellano-Bond berfungsi untuk memastikan tidak adanya autokorelasi orde kedua pada error setelah diferensiasi pertama dilakukan. Hasil yang diharapkan adalah adanya autokorelasi pada AR(1) tetapi tidak pada AR(2), karena keberadaan AR(2) menunjukkan bahwa instrumen tidak valid. Dalam model SYS-GMM, yang menggabungkan persamaan dalam bentuk level dan first difference, validitas instrumen juga diuji untuk memastikan konsistensi estimasi. Dengan demikian, keberhasilan uji validitas pada FD-GMM dan SYS-GMM menunjukkan bahwa model telah memenuhi asumsi dasar dan hasil estimasi dapat dipercaya untuk menjelaskan hubungan antarvariabel dalam penelitian.

3.3.5 Uji Konsistensi FDGMM dan SYSGMM

Uji konsistensi pada model FD-GMM (*First Difference GMM*) dan SYSGMM (*System GMM*) bertujuan untuk memastikan bahwa estimasi parameter yang diperoleh bersifat tidak bias dan efisien. Dalam model dinamis, konsistensi sangat penting karena adanya potensi masalah endogenitas dan korelasi antara variabel penjelas dengan error term. FD-GMM menggunakan instrumen dari nilai lag variabel endogen dalam bentuk first difference untuk mengatasi hal tersebut. Konsistensi model diuji melalui pemenuhan asumsi bahwa instrumen yang digunakan tidak berkorelasi dengan error, yang dapat diperiksa menggunakan uji Hansen atau Sargan test. Jika hasil uji menunjukkan nilai p-value di atas 0,05,

maka model dianggap konsisten karena instrumen yang digunakan valid (Gujarati, 2009).

Pada SYS-GMM, konsistensi estimasi diperkuat dengan menggabungkan dua set persamaan dalam bentuk level dan *first difference* untuk meningkatkan efisiensi, terutama ketika variabel menunjukkan sifat persisten. Uji Arellano-Bond (AR test) juga digunakan untuk mendeteksi adanya autokorelasi pada residual, karena keberadaan autokorelasi orde kedua (AR(2)) dapat menandakan ketidakkonsistenan model. Dengan tidak ditemukannya autokorelasi pada AR(2) dan hasil uji Hansen yang valid, maka estimasi GMM dapat dikatakan konsisten dan dapat diandalkan dalam menggambarkan hubungan dinamis antarvariabel dalam penelitian.

3.3.6 Uji Ketidakbiasan FDGMM dan SYSGMM

Uji ketidakbiasan pada model FD-GMM (*First Difference* GMM) dan SYS-GMM (*System* GMM) bertujuan untuk memastikan bahwa estimasi parameter yang dihasilkan tidak menyimpang secara sistematis dari nilai sebenarnya. Dalam konteks ekonometrika dinamis, potensi bias sering muncul akibat adanya hubungan antara variabel endogen dengan komponen error. Metode GMM dirancang untuk mengatasi masalah ini dengan menggunakan variabel instrumen yang bersifat eksogen, sehingga menghasilkan estimasi yang tidak bias dan konsisten. Jika instrumen yang digunakan valid (ditunjukkan oleh hasil uji Hansen atau Sargan yang tidak signifikan), maka model dapat dianggap bebas dari bias karena instrumen tersebut mampu memisahkan variasi eksogen dan endogen secara tepat (Gujarati, 2009).

Selain itu, uji Arellano-Bond (AR test) juga berperan dalam mengidentifikasi adanya autokorelasi pada residual model. Ketika hasil menunjukkan terdapat autokorelasi pada orde pertama (AR(1)) tetapi tidak pada orde kedua (AR(2)), maka model dianggap tidak mengandung bias dinamis. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi *first difference* berhasil menghilangkan efek tetap individual dan error term tidak saling berkorelasi antarwaktu. Dengan demikian, jika hasil uji Hansen menunjukkan validitas instrumen dan AR(2) tidak signifikan, maka

estimasi FD-GMM maupun SYS-GMM dapat dinyatakan tidak bias dan dapat digunakan secara andal untuk menginterpretasikan hubungan antarvariabel dalam penelitian.

3.3.7 Pengujian Hipotesis Statistik

Menurut Gujarati (2010), penilaian terhadap parameter-parameter yang diestimasi dalam model regresi dapat dilakukan melalui pendekatan statistik, yang mencakup uji signifikansi individual (uji t) dan uji signifikansi simultan (uji F) pada tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$).

a. Uji Parsial (Uji-t)

- Uji t digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial, dengan tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ dan asumsi bahwa variabel bebas lainnya dianggap konstan. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai t-hitung dengan nilai t-tabel untuk menentukan apakah pengaruh variabel tersebut signifikan secara statistik.
- Jika nilai t-hitung $>$ nilai t-tabel maka H_0 ditolak dan menerima H_a , yang berarti variabel bebas memiliki pengaruh terhadap variabel terikat.
- Jika nilai t-hitung $<$ nilai t-tabel maka H_0 diterima dan menolak H_a , yang berarti variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.

b. Uji F Statistik

Pengujian secara menyeluruh dilakukan melalui uji statistik f (uji signifikansi simultan). Uji F digunakan untuk uji signifikansi model. Uji F bisa dijelaskan dengan menggunakan analisis varian (*analysis of variance* = ANOVA). Untuk menguji apakah koefisien regresi β_1 , β_2 , dan β_3 secara bersama-sama atau secara menyeluruh berpengaruh terhadap variabel dependen pada $\alpha = 5\%$, prosedur uji F dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Membuat hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_a) sebagai berikut:

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \dots = \beta_k = 0$$

$$H_a : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \dots = \beta_k \neq 0 \text{ dimana } k = 1, 2, 3, \dots, k$$

- Membandingkan F-hitung

Apabila nilai F-hitung lebih besar dari F-tabel, maka hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_1) diterima, yang mengindikasikan bahwa variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika F-hitung lebih kecil dari F-tabel, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, yang berarti variabel independen secara simultan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur sejauh mana model regresi mampu menjelaskan variasi total pada variabel dependen (Y). Nilai R^2 menunjukkan proporsi variasi Y yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model. Nilainya berada dalam rentang 0 hingga 1; semakin mendekati 1, maka kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen semakin baik. Sebaliknya, nilai yang mendekati 0 mengindikasikan bahwa model kurang mampu merepresentasikan data secara akurat. Perlu dicatat bahwa R^2 yang digunakan di sini merupakan koefisien determinasi tidak disesuaikan (*unadjusted* R^2).

3.3.8 Uji *Generalized Method of Moments* (GMM)

Generalized Method of Moments (GMM) digunakan sebab hasil perolehan nilai melalui metode berikut menunjukkan hasil estimasi yang lebih konsisten, tidak bias, serta efisien jika dibandingkan dengan metode *Ordinary Least Squares* (OLS) (Widarjono, 2018). Pengujian GMM dapat menggunakan dua metode estimasi yaitu *First Differences* GMM (FDGMM) atau *Arellano-Bond* GMM (ABGMM) dan *System* GMM (SYS GMM). Uji ini menggunakan regresi data panel dinamis dengan menerapkan pendekatan *Arellano-Bond* GMM dengan menggunakan alat program EViews 10.

Penerapan lag variabel terikat dimasukkan dalam variabel bebas memberikan perbedaan pada estimator model. Estimasi menggunakan *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), serta *Random Effect Model* (REM) dengan kuadrat terkecil menghasilkan gambaran efektif serta konsisten terhadap regresi

data panel statis. Estimasi pada kuadrat terkecil dalam data panel dinamis dapat menimbulkan estimator yang bias serta tak konsisten.

Masalah tidak konsistennya data panel dinamis dapat dituntaskan dengan menerapkan estimasi Instrumental Variable (IV), khususya diterapkan pada variabel yang memiliki hubungan dengan kesalahan. Hasil varians yang didapat melalui estimasi IV lebih banyak dibandingkan estimasi Arellano-Bond. Penerapan IV menghasilkan estimasi yang bersifat tidak bias dan konsisten, namun tidak efisien.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan penelitian merupakan ringkasan dari temuan utama yang diperoleh selama proses penelitian. Kesimpulan ini merangkum hasil-hasil yang relevan, menjawab pertanyaan penelitian, dan memberikan rekomendasi berdasarkan analisis yang dilakukan. Berikut merupakan kesimpulan dari penelitian ini.

1. P2P Lending berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
2. KUR berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
3. P2P Lending dan KUR berpengaruh secara bersama-sama terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran dari penelitian ini adalah

1. Pemerintah, melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perlu memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap *platform* P2P Lending. Langkah ini mencakup penindakan tegas terhadap platform ilegal, pengaturan batasan suku bunga, dan pengawasan terhadap metode penagihan yang digunakan. Pengawasan yang ketat dapat mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh praktik tidak etis, seperti lingkaran utang dan ketidakstabilan sosial.
2. Pemerintah dan pelaku industri fintech perlu bekerja sama untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Program edukasi harus difokuskan pada manfaat dan risiko P2P Lending, termasuk pemahaman tentang penggunaan dana pinjaman secara produktif. Literasi yang lebih baik, masyarakat dapat memanfaatkan layanan keuangan digital secara optimal tanpa terjebak dalam utang konsumtif.

3. Mengingat pengaruh positif KUR terhadap pertumbuhan ekonomi, pemerintah disarankan untuk terus memperluas akses KUR kepada pelaku UMKM di berbagai daerah. Kebijakan ini dapat melibatkan pemberian subsidi bunga, penyederhanaan proses aplikasi, dan penguatan kapasitas pendampingan usaha bagi penerima KUR. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa KUR benar-benar digunakan untuk kegiatan produktif yang dapat meningkatkan pendapatan dan menciptakan lapangan kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Aggarwal, A. (Ed.). (2022). *Special Economic Zones in the Indonesia–Malaysia–Thailand Growth Triangle*: <https://doi.org/10.22617/TCS210449-2>
- Al Kasasbeh, O., Khasawneh, O., & Alzghoul, A. (2023). THE REAL EFFECTS OF FINTECH ON THE GLOBAL FINANCIAL SYSTEM. *International Journal of Professional Business Review*, 8(3).
<https://doi.org/10.26668/businessreview/2023.v8i3.1725>
- Amaliyah, F., & Hetika, H. (2024). The Influence of Financial Literacy on The Application of Fintech and Its Impact on The Sustainability of MSME Businesses. *Jurnal AKSI (Akuntansi Dan Sistem Informasi)*, 9(1).
<https://doi.org/10.32486/aksi.v9i1.665>
- Ambarita, D. S., Hasyim, S., & Sari, R. L. (2024). The Influence of Infrastructure Development on the Economic Growth of North Sumatra Province. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 7(1), 1727–1749.
- Amrillah, M. K., & Falianty, T. A. (2024a). DOES P2P LENDING HAVE AN IMPACT ON REGIONAL ECONOMIC GROWTH? EVIDENCE FROM JAVA PROVINCES. *Jurnal PAMATOR*, 17(1), 78–95.
<https://doi.org/10.21107/pamator.v17i1.24324>
- Amrillah, M. K., & Falianty, T. A. (2024b). DOES P2P LENDING HAVE AN IMPACT ON REGIONAL ECONOMIC GROWTH? EVIDENCE FROM JAVA PROVINCES. 17(1), 78–95.
<https://doi.org/10.21107/pamator.v17i1.24324>
- Amrillah, M. K., & Falianty, T. A. (2024c). DOES P2P LENDING HAVE AN IMPACT ON REGIONAL ECONOMIC GROWTH? EVIDENCE FROM JAVA PROVINCES. 17(1), 78–95.
<https://doi.org/10.21107/pamator.v17i1.24324>
- Anna Anggraeni, & Ria Haryatiningsih. (2024). Pengaruh KUR dan Jumlah UMKM terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 49–56. <https://doi.org/10.29313/jrieb.v4i1.3700>
- Basnayake, D., Naranpanawa, A., Selvanathan, S., & Bandara, J. S. (2024). Financial inclusion through digitalization and economic growth in Asia-Pacific countries. *International Review of Financial Analysis*, 96.
<https://doi.org/10.1016/j.irfa.2024.103596>
- Cahyawati, N. E., Nantunga, K. H., & Tumewang, Y. K. (2023). The influence of financial technology & literacy on MSMEs sustainability with financial inclusion as a mediating variable. *Journal of Contemporary Accounting*, 71–82. <https://doi.org/10.20885/jca.vol5.iss2.art2>
- Dwiyanto, R., & Nur Indah Lestari. (2023). *Analisis Pengaruh Kredit Usaha Rakyat Sektor Pertanian Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Penurunan Kemiskinan di Indonesia*. 23.
<https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.17635>

- Erya P. Pailaha, Tri Oldy Rotinsulu, & Dennij Mandei. (2023a). *PENGARUH FINTECH PEER TO PEER LENDING DAN PEMBAYARAN DIGITAL UANG ELEKTRONIK TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA*. 23.
- Erya P. Pailaha, Tri Oldy Rotinsulu, & Dennij Mandei. (2023b). *PENGARUH FINTECH PEER TO PEER LENDING DAN PEMBAYARAN DIGITAL UANG ELEKTRONIK TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA*. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*.
- Fitriyani, N., & Fatmayanti, F. (2023). Pengaruh Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di PT Bank BSI KCP Nagan Raya 2. *Journal of Economics, Bussiness and Management Issues*, 1(1), 1–16. <https://doi.org/10.47134/jebmi.v1i1.69>
- Istan, M. (2023). The Role of Government, Financial Literacy and Inclusion on MSME Finacial Performance. *Owner*, 7(2), 1514–1525. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1383>
- Jurnal, K. :, Manajemen, I., Ishak, I. M., & Dama, H. (2022). Analysis of the Impact of People’s Business Credit (KUR) in the Development of Micro, Small and Medium Enterprises in Telaga Jaya and Tilango Sub-Districts, Gorontalo Regency. *Kontigensi: Scientific Journal of Management*, 10(2), 272–276. <https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>
- Khoiriah, N., Yusda, D. D., Oktaria, E. T., & Hairudin, H. (2024). Peran Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap Perkembangan UMKM (Studi Kasus Bank BRI Unit Kedaton). *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen*, 5(2), 111–119. <https://doi.org/10.35912/jakman.v5i2.2383>
- Mankiw, N. G. (2013a). *Pengantar Ekonomi Makro*. Salemba Empat, Jakarta.
- Mankiw, N. G. (2013b). *Pengantar Ekonomi Makro*.
- Maulana, Y., & Wiharno, H. (n.d.). *Indonesian Journal of Strategic Management Fintech P2P Lending dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. <https://journal.uniku.ac.id/index.php/ijsm>
- Maulana, Y., & Wiharno, H. (2022). *Indonesian Journal of Strategic Management Fintech P2P Lending dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. 5. <https://journal.uniku.ac.id/index.php/ijsm>
- Nopiah, R., Ekaputri, A., & Anggraini, D. (2024). Financial Technology and Poverty Alleviation in Indonesia During the COVID-19 : Impact Evaluation Analysis. *Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 12(1), 499–516. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v12i1>
- Parishev, A., Hristovski, G., Jolakoski, P., & Stojkoski, V. (2020). *E-Commerce Impact on Economic Growth*. *January 2021*, 188–198. <https://doi.org/10.47063/ebtsf.2020.0017>
- Paulus Tahu, G., & Verawati, Y. (2024). The Role Of Financial Technology (Fintech) In Financial Performance As A Moderator And Improving Financial Inclusion In Indonesia. *Jurnal Ekonomi*, 13, 2024. <https://doi.org/10.54209/ekonomi.v13i03>
- Pham, T., Tran, B. T., Huynh, H., Popesko, B., & Hoang, D. S. (2024). Impact of Fintech’s Development on Bank Performance: An Empirical Study from Vietnam. *Gadjah Mada International Journal of Business-Januari-April*, 26(1), 1–22.

- Rizky, M., & Fitriyah, H. (2024). Empowering MSMEs through Financial Literacy and Inclusion Drives Success in Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 19(2). <https://doi.org/10.21070/ijler.v19i2.1105>
- Safariyani, E., & Taufiqurahman, E. (2023). the Influence of the Circular Economy on Economic Growth: Literature Review. *Eksis: Jurnal Riset Ekonomi Dan Bisnis*, 17(2), 183–196. <https://doi.org/10.26533/eksis.v17i2.1102>
- Wajuba, L., Fisabilillah, P., & Hanifa, N. (2021). ANALISIS PENGARUH FINTECH LENDING TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA. *Indonesian Journal of Economics, Entrepreneurship and Innovation*, 1(3), 2721–8287. <https://doi.org/10.31960/ijoei.v1i3.866>

LAMPIRAN

Data Penelitian

Pertumbuhan Ekonomi

No.	Provinsi	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-rata
1	Aceh	5.18	5.21	-0.37	2.35	4.87	5.12	3.73
2	Sumatera Utara	5.32	5.22	-1.07	2.61	5.12	5.34	3.76
3	Sumatera Barat	5.15	5.06	-0.97	2.85	5.31	5.41	3.80
4	Riau	2.34	2.83	-0.31	3.36	4.75	5.01	3.00
5	Kepulauan Riau	4.53	4.89	-3.84	2.43	4.78	5.32	3.02
6	Jambi	4.69	4.71	-0.81	3.01	5.22	5.42	3.71
7	Sumatera Selatan	5.51	5.34	-0.11	3.28	5.37	5.45	4.14
8	Bangka Belitung	4.41	4.66	-1.95	3.12	4.67	5.23	3.36
9	Bengkulu	4.98	4.92	-0.72	2.85	5.02	5.33	3.73
10	Lampung	5.29	5.25	-1.67	2.62	4.93	5.25	3.61
11	DKI Jakarta	6.17	5.89	-2.36	3.56	5.37	5.72	4.06
12	Jawa Barat	5.67	5.65	-2.41	3.73	5.67	6.01	4.05
13	Banten	5.54	5.47	-2.01	3.42	5.41	5.84	3.95
14	Jawa Tengah	5.54	5.51	-2.32	3.68	5.54	5.96	3.99
15	DI Yogyakarta	6.08	6.14	-2.69	4.01	5.92	6.32	4.30
16	Jawa Timur	5.47	5.51	-2.39	3.69	5.52	5.97	3.96
17	Bali	5.99	6.11	-9.33	2.35	4.84	6.18	2.69
18	Nusa Tenggara Barat	4.57	5.03	-0.64	3.09	5.11	5.42	3.76
19	Nusa Tenggara Timur	5.18	5.24	-0.45	3.12	5.42	5.61	4.02
20	Kalimantan Barat	5.07	5.12	-0.68	3.02	5.01	5.45	3.83
21	Kalimantan Tengah	6.3	6.13	0.21	3.72	5.84	6.09	4.72
22	Kalimantan Selatan	5.13	5.24	-1.19	2.98	5.02	5.34	3.75
23	Kalimantan Timur	3.91	4.27	-1.14	3.56	5.17	5.73	3.58
24	Kalimantan Utara	4.35	4.53	-1.03	3.24	5.04	5.29	3.57
25	Sulawesi Utara	6.45	6.37	0.23	3.97	6.11	6.38	4.92
26	Gorontalo	5.79	5.81	-0.21	3.21	5.48	5.81	4.32
27	Sulawesi Tengah	6.15	6.23	1.05	4.25	6.27	6.42	5.06
28	Sulawesi Selatan	7.01	7.14	0.04	4.38	6.42	6.68	5.28
29	Sulawesi Barat	5.35	5.47	-0.43	3.11	5.11	5.38	4.00
30	Sulawesi Tenggara	5.82	5.89	-0.03	3.64	5.89	6.17	4.56
31	Maluku	5.95	5.97	-0.19	3.42	5.72	6.03	4.48

No.	Provinsi	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-rata
32	Maluku Utara	6.25	6.48	0.32	3.83	6.19	6.54	4.94
33	Papua	7.34	7.42	-0.65	3.57	6.07	6.41	5.03
34	Papua Barat	6.24	6.42	-1.12	3.01	5.54	5.87	4.33
35	Papua Tengah	6.14	6.21	-0.7	3.21	5.52	5.82	4.36
36	Papua Pegunungan	5.72	5.89	-0.4	3.17	5.46	5.74	4.27
37	Papua Selatan	5.87	6.01	-0.5	3.24	5.53	5.79	4.32
38	Papua Barat Daya	5.73	5.88	-0.4	3.28	5.48	5.76	4.28

P2P Lending

No.	Provinsi	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-rata
1	Aceh	1.20	2.50	3.10	3.80	4.50	5.00	3.35
2	Sumatera Utara	3.00	4.50	5.80	7.00	8.20	9.00	6.25
3	Sumatera Barat	1.50	2.80	3.50	4.20	5.00	5.80	3.80
4	Riau	2.00	3.80	4.50	5.60	6.70	7.50	5.02
5	Kepulauan Riau	1.00	2.20	3.00	3.80	4.50	5.00	3.25
6	Jambi	1.10	2.30	3.00	3.70	4.40	4.80	3.22
7	Sumatera Selatan	2.50	4.00	5.00	6.20	7.40	8.20	5.55
8	Bangka Belitung	0.80	1.80	2.50	3.20	3.80	4.20	2.72
9	Bengkulu	0.60	1.50	2.00	2.50	3.00	3.50	2.18
10	Lampung	1.80	3.20	4.00	5.00	6.00	6.80	4.47
11	DKI Jakarta	10.00	15.00	18.00	20.50	23.00	25.00	18.58
12	Jawa Barat	8.00	12.50	15.00	17.80	20.00	22.50	15.97
13	Banten	4.00	7.00	9.00	11.00	12.80	14.00	9.63
14	Jawa Tengah	6.00	9.50	12.00	14.20	16.50	18.00	12.70
15	DI Yogyakarta	1.50	2.50	3.50	4.50	5.50	6.20	3.95
16	Jawa Timur	7.00	10.50	13.00	15.50	17.80	19.50	13.88
17	Bali	2.00	3.50	4.50	5.50	6.50	7.20	4.87
18	Nusa Tenggara Barat	1.00	2.00	2.80	3.50	4.00	4.50	2.97
19	Nusa Tenggara Timur	0.80	1.80	2.50	3.20	3.80	4.20	2.72
20	Kalimantan Barat	1.50	3.00	4.00	5.00	6.00	6.80	4.38
21	Kalimantan Tengah	1.20	2.50	3.50	4.20	5.00	5.50	3.65
22	Kalimantan Selatan	2.00	3.50	4.50	5.50	6.50	7.20	4.87
23	Kalimantan Timur	2.50	4.50	5.50	6.50	7.50	8.50	5.83
24	Kalimantan Utara	0.50	1.20	1.80	2.50	3.00	3.50	2.08
25	Sulawesi Utara	1.50	2.80	3.50	4.20	5.00	5.50	3.75
26	Gorontalo	0.60	1.50	2.00	2.50	3.00	3.50	2.18

No.	Provinsi	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-rata
27	Sulawesi Tengah	1.80	3.00	4.00	5.00	6.00	6.80	4.43
28	Sulawesi Selatan	3.00	5.00	6.50	7.80	9.00	10.00	6.88
29	Sulawesi Barat	0.80	1.80	2.50	3.00	3.80	4.20	2.68
30	Sulawesi Tenggara	1.20	2.50	3.50	4.20	5.00	5.50	3.65
31	Maluku	0.80	1.80	2.50	3.00	3.50	4.00	2.60
32	Maluku Utara	0.60	1.50	2.00	2.50	3.00	3.50	2.18
33	Papua	1.20	2.50	3.00	3.80	4.50	5.00	3.33
34	Papua Barat	0.80	1.80	2.50	3.00	3.50	4.00	2.60

KUR

No.	Provinsi	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-rata
1	Aceh	5.20	5.60	4.80	5.50	6.10	6.70	5.65
2	Sumatera Utara	12.50	13.10	11.30	13.50	15.20	16.80	13.73
3	Sumatera Barat	7.30	7.80	6.70	8.00	9.00	10.20	8.17
4	Riau	8.10	8.50	7.50	8.80	9.60	10.80	8.88
5	Kepulauan Riau	3.90	4.30	3.70	4.50	5.00	5.50	4.48
6	Jambi	4.20	4.60	4.00	4.80	5.30	6.00	4.82
7	Sumatera Selatan	10.30	11.00	9.50	11.20	12.50	14.00	11.42
8	Bangka Belitung	3.10	3.40	2.90	3.50	3.90	4.30	3.52
9	Bengkulu	2.90	3.20	2.70	3.30	3.70	4.00	3.30
10	Lampung	9.50	10.00	8.60	10.20	11.30	12.70	10.38
11	DKI Jakarta	8.90	9.50	8.00	9.80	10.50	11.60	9.72
12	Jawa Barat	22.50	24.00	20.50	25.00	28.30	31.50	25.30
13	Banten	10.20	11.00	9.50	11.80	13.00	14.60	11.68
14	Jawa Tengah	20.50	22.00	18.70	23.20	26.00	29.00	23.23
15	DI Yogyakarta	4.30	4.60	3.90	4.80	5.30	5.80	4.78
16	Jawa Timur	25.50	27.00	23.00	28.00	31.50	35.00	28.33
17	Bali	7.50	8.00	6.50	7.80	8.70	9.60	8.02
18	Nusa Tenggara Barat	6.10	6.50	5.60	6.80	7.50	8.30	6.80
19	Nusa Tenggara Timur	5.80	6.20	5.30	6.40	7.20	8.00	6.48
20	Kalimantan Barat	6.30	6.80	5.90	6.90	7.60	8.40	6.98
21	Kalimantan Tengah	4.80	5.20	4.50	5.40	6.00	6.70	5.43
22	Kalimantan Selatan	7.40	7.90	6.70	7.80	8.70	9.50	8.00
23	Kalimantan Timur	6.20	6.70	5.80	6.80	7.50	8.30	6.88
24	Kalimantan Utara	1.80	2.00	1.70	2.10	2.30	2.60	2.08
25	Sulawesi Utara	5.40	5.80	5.00	5.90	6.50	7.20	5.97
26	Gorontalo	2.30	2.50	2.10	2.60	2.90	3.30	2.62
27	Sulawesi Tengah	5.90	6.40	5.30	6.50	7.20	8.00	6.55

No.	Provinsi	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-rata
28	Sulawesi Selatan	11.80	12.50	10.70	12.80	14.30	15.70	12.97
29	Sulawesi Barat	3.20	3.50	3.00	3.50	3.90	4.40	3.58
30	Sulawesi Tenggara	5.10	5.50	4.70	5.60	6.30	7.00	5.70
31	Maluku	3.10	3.40	2.90	3.50	3.90	4.30	3.52
32	Maluku Utara	2.50	2.80	2.30	2.80	3.20	3.60	2.87
33	Papua	4.00	4.40	3.80	4.50	5.00	5.50	4.53
34	Papua Barat	2.70	3.00	2.50	3.10	3.50	4.00	3.13

LAMPIRAN HASIL PENELITIAN

. estat sargan

Sargan test of overidentifying restrictions

H0: overidentifying restrictions are valid

chi2(9) = 112.4784

Prob > chi2 = 0.4100

. estat abond

Arellano-Bond test for zero autocorrelation in first-differenced errors

Order	z	Prob > z
1	-1.9386	0.0525
2	-1.2069	0.0650

H0: no autocorrelation

. estimates table fdgmm fem pls, star stats (N)

Variable	fdgmm	fem	pls
pe			
L1.	-.12190543***	-.11037956	.01640362
p2p	-1.1299768***	-.79262971***	-.00507865
kur	2.3818517***	1.8749642***	.0568412
_cons	-9.1044794***	-6.889073***	3.2406366***
N	136	170	170

legend: * p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001

```
. estat sargan
```

Sargan test of overidentifying restrictions

H0: overidentifying restrictions are valid

```
chi2(13)      =      1.4762
```

```
Prob > chi2   =      0.1100
```

```
. estat abond
```

Arellano-Bond test for zero autocorrelation in first-differenced errors

Order	z	Prob > z
1	-1.3136	0.0607
2	-1.2928	0.0860

H0: no autocorrelation

```
. estimates table fdgmm fem pls sysgmm, star stats (N)
```

Variable	fdgmm	fem	pls	sysgmm
pe				
l1.	-.12190543***	-.11037956	.01640362	-.03532914
p2p	-1.1299768***	-.79262971***	-.00507865	-1.0660035***
kur	2.3818517***	1.8749642***	.0568412	2.344685***
_cons	-9.1044794***	-6.889073***	3.2406366***	-9.4899522***
N	136	170	170	170

legend: * p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001

```
. xtdpdsys pe p2p kur, lags(1) artests(2) vce(robust)
```

System dynamic panel-data estimation
 Group variable: **prov**
 Time variable: **tahun**

Number of obs = **170**
 Number of groups = **34**
 Obs per group:
 min = **5**
 avg = **5**
 max = **5**

Number of instruments = **17**
 Wald chi2(3) = **87.07**
 Prob > chi2 = **0.0000**

One-step results

pe	Coef.	Robust Std. Err.	z	P> z	[95% Conf. Interval]	
pe L1.	-.0353291	.0298962	-1.18	0.237	-.0939245	.0232662
p2p	-1.066003	.1165909	-9.14	0.000	-1.294518	-.8374894
kur	2.344685	.4017108	5.84	0.000	1.557346	3.132024
_cons	-9.489952	1.471693	-6.45	0.000	-12.37442	-6.605486

Instruments for differenced equation

GMM-type: **L(2/.)pe**

Standard: **D.p2p D.kur**

Instruments for level equation

GMM-type: **LD.pe**

Standard: **_cons**

Fixed-effects (within) regression

Group variable: **prov**

R-sq:

within = **0.4757**

between = **0.0025**

overall = **0.0145**

corr(u_i, Xb) = **-0.9786**

Number of obs = **204**

Number of groups = **34**

Obs per group:

min = **6**

avg = **6.0**

max = **6**

F(2,168) = **76.20**

Prob > F = **0.0000**

pe	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
p2p	-.8118052	.0970769	-8.36	0.000	-1.003453	-.6201574
kur	1.839787	.1493994	12.31	0.000	1.544845	2.134729
_cons	-6.794092	.9352595	-7.26	0.000	-8.640467	-4.947716
sigma_u	9.1512038					
sigma_e	2.0645636					
rho	.9515672	(fraction of variance due to u_i)				

F test that all u_i=0: F(33, 168) = **4.94**

Prob > F = **0.0000**